

**EKSISTENSI UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT JAYA MAKMUR
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA SUKA DATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**FERISTIANSIH
NIM. 16631156**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Lampiran : Persetujuan Pembimbing

Prihal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara: **Feristiansih, Nim: 16631156**, mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK BKM) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Curup, Juli 2020

Pembimbing I



Noprizal, M.Ag

NIP . 19771105210901 1 007

Pembimbing II



Musda Asmara, MA

NIP . 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feristiansih
NIM : 16631156
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Juli 2020
Penulis,




Feristiansih
Nim. 16631156



KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah & ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1762/In.34/FS/PP.00.9/P/2020

Nama: **Feristiansih**
 Nim: **16631156**
 Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi: **Perbankan Syariah**
 Judul: **Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal: **Selasa, 25 Agustus 2020**
 Pukul: **14.00 – 15.30 WIB.**
 Tempat: **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Curup, September 2020
 Sekretaris,

Mabrur Syah, S.Pd.L, S.Ir, M.HI
 NIP. 19800818 200212 1 003

Hendrianto, MA
 NIDN. 202168701

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Isan, SE., M.Pd, MM
 NIP. 19750219 200604 1 008

Hj. Dwi Sulastvawati, M. Sc.
 NIP. 19940222 200912 2 010

Mengesahkan



Dr. Yusufri, M. Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang”. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman buta akan agama hingga ke zaman yang islami seperti saat sekarang ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah (PS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis sendiri menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Atas semua bantuan dan sumbangsih tersebut maka penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Ketua Program Studi Perbankan Syariah

4. Bapak Noprizal, M.Ag dan Ibu Musda Asmara, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM selaku pembimbing Akademik.
6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama dalam masa perkuliahan selesainya skripsi.
7. Seluruh masyarakat Desa Suka Datang tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Curup, Juli 2020

Penyusun,



Feristiansih

Nim. 16631156

MOTTO

“DISIPLIN ADALAH JEMBATAN ANTARA CITA-
CITA DAN PENCAPAIANNYA”

PERSEMBAHAN

Seiring waktu berjalan meskipun harus melalui jalan yang beliku dan mendaki jurang yang terjal, meskipun dengan keringat yang jatuh bercucuran, air mata yang berlinang, akhirnya kugapai juah secercah harapan yang telah diperjuangkan dan kudambakan selama ini.

Melalui lembaran sederhana ini ku haturkan terimah kasih kepada:

1. Ayahanda (Selamat), ibunda (Wastuti) tercinta sebagai pahlawanku dan selalu memberi doa tulus yang tiada tara didunia ini bahkan hingga akhirat sekalipun. Yang selalu menyayangiku.
2. Ayunda tersayang Okatria Widiasih, dan ayunda Melisa yang memberikan semangat dan mengingatkanku dalam berbagai hal.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberiku ilmu serta sabar dalam membimbing, semoga bermanfaat untuk dunia akhirat.
4. Untuk teman-teman yang selalu mewarnai hari-hariku Rahma Utari, Oktaria Dwisti, serta Squad Fellowship Riski Rismawati, Ramayani, Silfia, Odi, Pebi, Fauzi, Pipin, Alm. Putra, dan Randi. Untuk teman- teman seangkatan dan seperjuangan Perbankan Squad D yang tidak bisa disebutkan satu-satu semoga kita semua menjadi orang yang sukses Aamiin..
5. Almamater IAIN CURUP.

**EKSISTENSI UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT JAYA MAKMUR
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA SUKA DATANG**

**Oleh:
Feristiansih (16631156)**

ABSTRAK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Guna menjamin proses pengelolaan kegiatan yang baik dan sinambung di lokasi program maka dibentuk suatu Unit Pengelolaan Keuangan disetiap kecamatan dengan nama UPK BKM Jaya Makmur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi dan kendala-kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif kualitatif*, pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Suka Datang dan Lembaga UPK BKM.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang sudah sangat membantu dan membawa perubahan serta perkembangan yang cukup baik dan termasuk ke dalam ciri khas eksistensi Tahap etis yaitu berkaitan dengan keadaan masyarakat dan norma yang berlaku. *Kedua*, Kendala-kendala terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu *pertama* dari lembaga UPK BKM nya karena adanya keterbatasan anggaran dana dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar iuran secara tepat waktu. Kemudian dari masyarakatnya yaitu terhambat karena faktor alam seperti gagal panen, fluktuasi harga dan pandemi corona.

Kata Kunci : Eksistensi, UPK BKM, Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Eksistensi	25
B. Badan Keswadayaan Masyarakat	31
C. Kesejahteraan.....	61

BAB III GAMBARAN UMUM	73
A. Profil Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat	
Jaya Makmur Desa Suka Datang	73
1. Sejarah Terbentuknya	73
2. Visi Misi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang	81
3. Mekanisme Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara	82
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 85
A. Hasil Penelitian	85
1. Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang	85
2. Kendala-Kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang	98
B. Pembahasan	102
 BAB V PENUTUP	 110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	 112
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

3.1 Struktur Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang	69
3.2 Struktur Unit Pengelolaan Keuangan	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur, meliputi: Peningkatan Publik, Peningkatan Peran serta dan Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan daya saing daerah.¹

Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama Negara - negara berkembang. Kemiskinan di Negara berkembang umumnya disebabkan oleh terbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ketidaktetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan. Tingginya angka kemiskinan saat ini tidak luput dari faktor pengangguran yang semakin bertambah dan terus bertambah setiap harinya. Penyebabnya karena keminiman lapangan pekerjaan yang tersedia namun laju pertumbuhan penduduk bertambah setiap harinya. Inovasi terbaru dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta pengangguran saat ini adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berdasar kepada keputusan Menteri Koordinator Bidang

¹ Istan, M. (2017), *Implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong Bengkulu, EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, h. 2

Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.² Pelaksanaan program ini ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat pada setiap kelurahan atau desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Guna menjamin proses pengelolaan kegiatan yang baik dan sinambung di lokasi program maka dibentuk suatu Unit Pengelola Keuangan disetiap kecamatan, salah satunya berada di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan nama Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur yang berdiri pada tahun 2009.³ Unit Pengelolaan Keuangan yang berjalan saat ini yaitu kegiatan sumber daya keuangan melalui dana bergulir. Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir sepenuhnya diserahkan pada warga masyarakat setempat. Dengan tujuan menyediakan akses layanan pinjaman mikro rumah tangga berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

² Jayanti, P. (2013), *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam PelaKelompok Sejahteraan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (3), h. 3

³ Wawancara dengan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 02 Februari 2019, jam 16.00

Program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat bertujuan untuk memperdayakan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Tujuan yang mulia dari program ini mendapatkan legitimasi dari alquran surah Al - Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota - kota Mekkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa pembangunan masyarakat yang merata, yang menciptakan kondisi di mana semua orang merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif.

Berdasarkan observasi pada awalnya memang saya adalah masyarakat Desa Suka Datang. Ketika itu saya melihat bagaimana keadaan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Setelah itulah saya

menemukan suatu masalah yang menimbulkan tentang keberadaan dari Lembaga Keuangan tersebut yaitu dari program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat. Observasi awal yang yang saya lakukan kepada bapak Muhammad Amin salah satu masyarakat Desa Suka Datang yang berprofesi seorang pencetak batu bata yang meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan mengatakan bahwa kegiatan pinjaman bergulir yang diikutinya karena adanya promosi yang diberikan dan diajak ikut dalam pinjaman tersebut. Proses pembuatan batu bata dari usahanya yang hanya bisa memproduksi 100bata/hari berkat pinjaman dana Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini bisa menambah 500buah atau 1000/hari. Hasil pinjaman tersebut membawa perubahan yang baik bagi aspek produksi dan konsumsi mereka hingga sampai saat ini masih tetap aktif menjalankan usahanya.

Besarnya dana yang diberikan kepada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur sekisar Rp 123.500.000. Dana Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini diperoleh dari PNPM Mandiri. Dana PNPM Mandiri tersebut berasal dari bank dunia yang kemudian disalurkan ke APBD yang penggunaannya dan penyalurannya harus dipertanggungjawabkan oleh Negara. Golongan/kelompok peminjam Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di desa Suka Datang ini adalah Petani

(Palawija dan Hortikultura), Peternakan, Pedagang, dan Percetakan Batu Bata.⁴

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan yaitu dalam surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۗ

Artinya: *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”*. (QS. Quraisy [106]: 3-4)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu: Menyembah Tuhan (pemilik) *Ka’bah*, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.⁵ Berkaitan dengan masalah penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dilihat dari menghilangkan rasa lapar sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya usaha yang didirikan berkat dana pinjaman dari Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan mengadakan penelitian lebih dalam untuk mengetahui adanya peningkatan masyarakat melalui Unit Pengelolaan

⁴ Wawancara dengan Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 02 Februari 2019, jam 16.00

⁵ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol.3, No 2, Desember 2015. h.383

Keuangan yang mana terlepas dari Lembaga Keuangan Non Bank. Sehingga peneliti mengangkat judul “**Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suka Datang**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang diteliti. Peneliti memfokuskan untuk mengetahui Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang.

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah agar penelitian ini tersusun teratur dan sistematis. Maka dengan hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang?
2. Apa saja kendala - kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.
 - b. Bagi penulis sendiri menambah pengetahuan tentang pentingnya lembaga keuangan melalui program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau referensi penelitian yang akan datang.
 - b. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat terutama dalam Program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil riset Cut Ayunarisha dengan judul **“Efektifitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat Pada Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Pidie Jaya”**.⁶ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada Unit Pengelolaan Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Pidie Jaya sudah efektif. Jenis Penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan Simpan Pinjam Syariah ada beberapa tahapan, mekanisme penyaluran pembiayaan, akad pembiayaan, pengelolaan, waktu peluncuran dana, penunggakan, pengembalian pembiayaan. Sedangkan efektivitas pembiayaan pada Unit Pengelola Keuangan Simpan Pinjam Syariah, ditinjau dari beberapa tahapan pada mekanisme, dari tahapan enam mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dinilai dari efektifitasnya kurang efektif. Saran peneliti dapat diharapkan kepada Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Pidie

⁶ Cut Ayunarisha, *Efektifitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat Pada Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Di Pidie Jaya*”, Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Oktober 2019), h. xv

Jaya sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana bagi masyarakat agar menjalankan kewajiban dalam pengelolaan tersebut dengan baik dan benar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cut Ayunarisha, melakukan penelitian dengan subjek efektifitas mekanisme pembiayaan, sedangkan subjek penelitian dalam penelitian peneliti masyarakat dan program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan Cut Ayunarisha studi kasus yang digunakannya Trienggadeng Pidie Jaya Banda Aceh, sedangkan penelitian peneliti studi kasusnya terletak di Desa Suka Datang.

2. Berdasarkan hasil riset Muhammad Idris dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul”**.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Unit Pengelolaan Keuangan sebelum dan sesudah diberhentikan dana PNPM Mandiri Perkotaan terhadap pinjaman bergulir. Kinerja keuangan Unit Pengelolaan Keuangan diproksi menggunakan *Loan at Risk (LAR)*, *Portfolio at Risk (PAR)*, *Return on Investment (ROI)* dan *Cust Coverage Ratio (CCr)*.

⁷ Muhammad Idris, *Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul*, Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2017), h. vii

Jenis penelitian ini adalah analisis komparatif. Populasi penelitian adalah seluruh Unit Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Bantul yang berjumlah 50 Lembaga Keswadayaan Masyarakat dengan sampel berjumlah 35 Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan program SPSS versi 20.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat perbedaan pada *Loan at Risk* (LAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (2) Tidak terdapat perbedaan pada *Portofolio at Risk* (PAR), baik sebelum dan sesudah penghentian dana PNPM Mandiri Perkotaan. (3) Terdapat perbedaan pada *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (4) Tidak terdapat perbedaan pada *Cost Coverage* (CCr) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idris, melakukan penelitian dengan subjek penelitian analisis kinerja keuangan, sedangkan subjek penelitian peneliti masyarakat dan program Unit Pengelolaan Keuangan. Penelitian yang dilakukan Muhammad Idris studi kasus yang digunakannya di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian peneliti studi

kasusnya terletak di Desa Suka Datang. Jenis penelitian Muhammad Idris adalah analisis komparatif, sedangkan penelitian peneliti adalah kualitatif.

3. Berdasarkan hasil riset Abidin dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di Unit Pengelolaan Keuangan.”**⁸

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pinjaman dana tanpa agunan bisa dipraktekkan di Unit Pengelolaan Keuangan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan dana PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan obyeknya mengenai gejala - gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dianalisis dengan teori - teori yang ada. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin di Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data - data yang diperoleh di lapangan dan dirangkum dengan memilih hal - hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data - data yang

⁸ Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di Unit Pengelolaan Keuangan, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Skripsi (Doctoral dissertation, UIN Walisongo, Januari 2016), h. vii

benar terkait dengan permasalahan yang dibahas. Deskriptif analisis data praktek pinjaman tanpa agunan PNPM Penggaron Lor mendeskripsikan proses pelaksanaan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang dan analisis dari tinjauan segi hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan PNPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum praktek pinjaman tanpa agunan PNPM dikategorikan dalam Al - Qardh atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada sedekah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima sedekah, Rasulullah SAW. sendiri pun melakukan transaksi Al - Qardh. Jadi transaksi Al - Qardh dalam PNPM dibolehkan. Dengan adanya pinjaman tanpa agunan PNPM, warga miskin di kelurahan Penggaron Lor diharapkan menjadi masyarakat yang berdaya. (2) Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM kelurahan Penggaron Lor dikategorikan dalam Al-Qardh. Dalam literatur fiqh klasik, Al - Qardh dikategorikan dalam aqd ta'awuni yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Keberadaan PNPM memberikan maslahat bagi warga miskin seperti menyantuni warga jompo miskin, membuat WC Sepitenk bagi warga miskin yang tidak punya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abidin, melakukan penelitian dengan subjek penelitian tinjauan hukum islam, sedangkan subjek penelitian dalam penelitian peneliti adalah masyarakat dan program Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin studi kasus yang digunakannya Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang, sedangkan penelitian peneliti studi kasusnya terletak di Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Rejang Lebong.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

NO	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Cut Ayunarisha (Tahun 2019) Efektifitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat Pada Unit Pengelola Keuangan (UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Di Pidie Jaya	-	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan Simpan Pinjam Syariah ada beberapa tahapan, mekanisme penyaluran pembiayaan, akad pembiayaan, pengelolaan, waktu peluncuran dana, penunggakan, pengembalian pembiayaan. Sedangkan efektifitas pembiayaan pada Unit Pengelola Keuangan Simpan Pinjam Syariah, ditinjau dari beberapa tahapan pada mekanisme, dari tahapan enam mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dinilai dari efektifitasnya kurang efektif.

2	Muhammad Idris (Tahun 2017) Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul	-	Analisis Komparatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat perbedaan pada <i>Loan at Risk</i> (LAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (2) Tidak terdapat perbedaan pada <i>Portofolio at Risk</i> (PAR), baik sebelum dan sesudah penghentian dana PNPM Mandiri Perkotaan. (3) Terdapat perbedaan pada <i>Return on Investment</i> (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (4) Tidak terdapat perbedaan pada Cost Coverage (CCr) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan.
3	Zaenal Abidin (Tahun 2016) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN	-	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum praktek pinjaman tanpa agunan PNPM dikategorikan dalam Al - Qardh atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada sedekah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih

				<p>membutuhkan dari pada orang yang menerima sedekah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi Al - Qardh. Jadi transaksi Al - Qardh dalam PNPM dibolehkan. Dengan adanya pinjaman tanpa agunan PNPM, warga miskin di kelurahan Penggaron Lor diharapkan menjadi masyarakat yang berdaya. (2) Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan PNPM kelurahan Penggaron Lor dikategorikan dalam Al - Qardh. Dalam literatur fiqh klasik, Al - Qardh dikategorikan dalam aqd ta'awuni yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Keberadaan PNPM memberikan masalah bagi warga miskin seperti menyantuni warga jompo miskin, membuat WC Sepitenk bagi warga miskin yang tidak punya.</p>
--	--	--	--	--

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual. *Existere* disusun dari *ex*

yang artinya keluar dan *sister* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, adalah keberadaan adalah kesempurnaan.⁹

Sedangkan menurut Abidin eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri yakni *existere*. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.¹⁰

Lebih jelas Graham mengemukakan bahwa eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata Latin *existere* yang berarti lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, daripada berarti kondisi mengada (*state of being*).¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Selasa 31 Desember 2019, jam 13.00

¹⁰ Zaenal Abidin, *Analisis EKelompok Sejahteratenital*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16

¹¹ Helen Graham, *The Human Face of Psychology: Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 114

2. Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat

Unit Pengelolaan Keuangan adalah Unit Pengelolaan Keuangan yang merupakan badan pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin dengan pemberian pinjaman bergulir yang khususnya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.¹²

BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang merupakan lembaga kepemimpinan masyarakat yang bertugas untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan.¹³

3. Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan lain sebagainya). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, yang berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.¹⁴

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan pada batasannya. Namun, menurut Islam kesejahteraan itu dapat

¹² Muhammad Tammima Zuhri, *Analisa Kinerja Keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta*, Skripsi (Doctoral dissertation UII) 2016, h.18

¹³ *Ibid.*, h. 12

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Selasa 31 Desember 2019, jam 13.00

diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkatan yang imbang (*balance*).¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa judul yang dimaksud mengenai eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini yaitu bagaimana keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Apakah benar-benar adanya peningkatan dan perubahan dengan adanya Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terhadap masyarakatnya sebelum dan sesudah adanya Unit Pengelolaan Keuangan ini dan bagaimana pengelolaan yang terjadi dalam Unit Pengelolaan Keuangan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa eksistensi adalah suatu keberadaan yang ada dan harus tetap ada atau muncul. Jadi dapat dikatakan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan ini sudah ada berdiri dan harus tetap ada sesuai dengan namanya yaitu eksis bagaimana keeksistensiannya sampai sekarang ditengah masyarakat. Eksistensi ini tidak lain dilatarbelakangi oleh peran masyarakat yang masih menggunakan jasa yang ditawarkan Unit Pengelolaan Keuangan guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah ilmu-ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisa berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha

¹⁵ Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, (Malang: SuKelompok Sejahteraes Offet, 2007), h. 10

menghitung dan mengualifikasi data kualitatif yang diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka.¹⁶ Bisa dikatakan dalam penelitian ini menggambarkan fenomena secara detail. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan demikian penelitian ini menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata. Deskriptif adalah metode yang digunakan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut.

Peneliti menggunakan kualitatif karena melihat eksistensi itu lebih kepada peran bagaimana keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat tersebut, jika menggunakan kualitatif peneliti dapat secara langsung mewawancarai, kita juga bisa lebih mengetahui secara langsung dan merasakan bagaimana perasaan dan keadaan narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informasi yaitu masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 13

Rejang Lebong. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang penulis dapatkan merupakan data hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu masyarakat Desa Suka Datang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari data pendukung, meliputi dokumentasi atau literatur - literatur yang relevan sebagai data penunjang untuk memperkuat hasil penelitian ini. Jadi data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, dan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁷ Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka)

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1984, h. 136

mulai dari metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya.¹⁸

Pada observasi ini, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari objek penelitian, karakter, fisik, situasi sosial dan bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut selama peneliti di lapangan, masyarakat menerima dengan baik dan bisa bekerja sama ketika melakukan penelitian. Observasi yang saya lakukan di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 02 Februari 2019, pukul 16.00 WIB.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.¹⁹

Dalam penelitian ini wawancara digunakan guna memperoleh data observasi awal secara langsung dari narasumber dengan menggunakan wawancara secara terstruktur di mana sudah mempersiapkan pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan kriteria informan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), pekerjaan dan alamat.

Wawancara dilakukan langsung dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Suka Datang yang meminjam di Unit Pengelolaan

¹⁸ *Ibid*, h. 14

¹⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2003, h. 162

Keuangan dan dari Lembaga Unit Pengelolaan Keuangan. Sehingga saya mewawancarai 14 narasumber, 14 narasumber tersebut dua orang berasal dari pengurus Unit Pengelola yaitu ketua dan sekretaris. Serta 12 orang lagi berasal dari masyarakat yang meminjam. Dari masyarakat yang meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terdiri dari Empat Kelompok Swadaya Masyarakat, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra terdiri dari golongan petani cabe bernama Ibu Susilawati usia 40 tahun, petani tomat bernama Ibu Anisa yang berusia 47 tahun dan petani padi bapak Jumikun usia 70 tahun.

Setiap kriteria pekerjaan saya hanya mengambil satu perwakilan untuk dijadikan sampel. Kemudian dari golongan Kelompok Swadaya Masyarakat Kamboja yaitu seorang pedagang: warung manisan yang bernama Ibu Subaida yang berusia 40 tahun, dan pedagang sayur pasar subuh oleh Ibu Reka yang berusia 31 tahun, Kelompok Swadaya Masyarakat anggrek terdiri dari tukang ojek karena hanya ada 5 anggota sehingga saya mencoba mengambil dua orang sampel untuk membedakan dan membuktikan bagaimana pinjaman dari seorang tukang ojek yaitu bernama bapak Mil yang berusia 55 tahun, kemudian bapak Ansori yang berusia 45 tahun dan Kelompok Swadaya Masyarakat Bahagia terdiri dari Peternak ayam karena hanya ada dua orang dan saya mengambil keduanya untuk wawancara yang bernama bapak Rizal berusia 40 tahun, dan bapak Atim 45 tahun dan peternak

itik hanya ada satu sehingga satu orang yang saya wawancara yaitu Ade Sanjaya berusia 27 tahun, serta percetakan batu bata hanya ada dua orang sehingga saya mengambil dua orang yang wawancara yaitu bernama bapak Muhammad Amin berusia 47 tahun dan bapak Muhammad Arif berusia 35 tahun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data atau dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto/ gambar selama melakukan proses penelitian yaitu berupa hasil foto aspek produksi masyarakat yang meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai sampai diperoleh data yang dianggap kredibilitas.

Aktivitas dalam analisis data Model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.²⁰

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

²⁰ Miles dan Huberman, *Pokoknya Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 2005), h. 165

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

Disini peneliti menggunakan reduksi data untuk mewawancarai masyarakat yang menggunakan Unit Pengelolaan Keuangan serta bagaimana pengelolaan yang terjadi dalam Unit Pengelolaan Keuangan tersebut sehingga peneliti dapat mengukur tingkat indikator kesejahteraan masyarakat yang menggunakan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Suka Datang.

b. Penyajian data

Setelah data reduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksistensi

Dalam memahami eksistensi terdapat beberapa pengertian dan ciri khas sebagai berikut:

1. Pengertian

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sister* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, adalah keberadaan adalah kesempurnaan.²¹

Sedangkan menurut Abidin eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri yakni *existere*. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.²²

Lebih jelas Graham mengemukakan bahwa eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata Latin *existere* yang berarti lebih

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1307

²² Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, h. 16

menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, daripada berarti kondisi mengada (*state of being*).²³

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

2. Ciri-Ciri Eksistensi

- a. Motif pokok yakni cara manusia berada, hanya manusialah yang bereksistensi. Di mana eksistensi adalah cara khas manusia berada, dan pusat perhatian ada pada manusia, karena itu bersifat humanistic.
- b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya.
- c. Didalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih pada sesama manusia.
- d. Filsafat eksistensialisme memberi tekanan pada pengalaman konkret, pengalaman eksistensial.²⁴

Pendapat selanjutnya berdasarkan teori Kierkegaard menerangkan bahwa eksistensi adalah suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia

²³ Helen Graham, *Op.Cit.*, h. 114

²⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 185

untuk menentukan hidupnya, dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil. Jika manusia tidak berani untuk melakukannya maka manusia tidak bereksistensi dengan sebenarnya. Tiap eksistensi memiliki cirinya yang khas. Kierkegaard telah mengklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yakni tahap estetis (*the aesthetic stage*), etis (*the ethical stage*), dan *religious (the religious stage)*.²⁵

1) Tahap Estetis (*The Aesthetic Stage*)

Tahap ini merupakan situasi keputusan sebagai situasi batas dari eksistensi yang merupakan ciri khas tahap tersebut. Adapun dalam tahap estetis yakni terdapat: Pengalaman emosi dan sensual memiliki ruang yang terbuka.

Dalam pembahasan ini, Kierkegaard menerangkan adanya dua kapasitas dalam hidup ini, yakni sebagai manusia sensual yang merujuk pada indra dan makhluk rohani yang merujuk pada manusia yang sadar secara rasio. Pada tahap ini cenderung pada wilayah indra. Jadi, kesenangan yang akan dikejar berupa kesenangan indra yang hanya didapat dalam kenikmatan segera. Sehingga akan berbahaya jika manusia akan diperbudak oleh kesenangan nafsu, di mana kesenangan yang diperoleh dengan cara instan. Terdapat perbuatan radikal dari tahap ini adalah adanya kecenderungan untuk menolak moral universal. Hal ini dilakukan karena kaidah moral dinilai dalam mengurangi untuk memperoleh kenikmatan indra yang didapat. Sehingga dalam tahap ini

²⁵ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 251

tidak ada pertimbangan baik dan buruk, yang ada adalah kepuasan dan frustrasi, nikmat dan sakit, senang dan susah, ekstasi dan putus asa.

2) Tahap Etis (*The Ethical Stage*)

Tahap etis merupakan lanjutan dari tahap estetis, tahap ini lebih tinggi dari tahap sebelumnya yang hanya berakhir dengan keputusan dan kekecewaan. Melainkan tahap etis ini dianggap lebih menjanjikan untuk memperoleh kehidupan yang menyenangkan. Adapun keterangan lebih lanjut yakni: Kaidah-kaidah moral menjadi hal yang dipertimbangkan.

Dalam tahap etis, individu telah memperhatikan aturan-aturan universal yang harus diperhatikan. Di mana individu telah sadar memiliki kehidupan dengan orang lain dan memiliki sebuah aturan. Sehingga dalam suatu kehidupan akan mempertimbangkan adanya nilai baik atau buruk. Pada tahap inilah manusia tidak lagi membiarkan kehidupannya terlena dalam kesenangan indriawi. Manusia secara sadar diri menerima dengan kemauannya sendiri pada suatu aturan tertentu.

Bahkan pada tahap etis manusia melihat norma sebagai suatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Manusia telah berusaha untuk mencapai asas-asas moral universal. Namun, manusia etis masih terkungkung dalam dirinya sendiri, karena dia masih bersikap imanen, artinya mengandalkan kekuatan rasionya belaka.²⁶ Di mana orang etis benar-benar menginginkan adanya aturan karena aturan membimbing dan

²⁶ *Ibid.*, h. 253.

mengarahkannya, terutama ketika hidup dalam kebersamaan. Sehingga dalam kondisi ini terdapat kebebasan individu yang dipertanggungjawabkan. Adapun aturan dan norma merupakan wujud kongkret untuk memberikan pencerahan dalam suatu problem. Sehingga Manusia akan menjadi saling menghargai dan tidak arogan dengan manusia yang lain. Mereka pada akhirnya dapat hidup dalam tatanan masyarakat yang baik.

3) Tahap Religious (*The Religious Stage*)

Eksistensi pada tahap *religious* merupakan tahapan yang paling tinggi. Adapun keterangan selanjutnya dapat dilihat dari keputusan sebagai cara cepat menuju kepercayaan. Maksudnya adalah tahap menuju permulaan yang sesungguhnya, dan bukan menjadi final dalam kehidupan. Sehingga keputusan dijadikan sebagai tahap awal menuju eksistensi religious yang sebenarnya. Di mana tahap ini tidak lagi menggeluti hal-hal yang konkret melainkan langsung menembus inti yang paling dalam dari manusia, yaitu pengakuan individu akan Tuhan sebagai realitas yang Absolut dan kesadarannya sebagai pendosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan.

Pada dasarnya keputusan telah dianggap sebagai sebuah penderitaan yang mendalam dialami oleh individu. Hal ini dapat terjadi jika keputusan dilakukan tanpa adanya kesadaran atau sadar namun tidak memiliki respons yang positif atau kehendak dan aksi untuk membenarkan, sehingga akan menyudutkan manusia pada jurang

kehancuran. Kesadaran untuk membenarkan yang dimaksud adalah kemauan dari diri individu untuk sadar akan kekurangannya dan menyerahkan diri pada tuhan. Di mana individu mengakui bahwa ada realitas tuhan yang sebagai pedoman. Dengan demikian, individu jika mengalami problematik dalam hidupnya tidak akan mudah tergoyah. Adapun individu mengalami problematik ia akan berpegang dengan tali yang sangat kuat yakni dengan keyakinan. Adapun pada tahap ini individu membuat komitmen personal dan melakukan apa yang disebutnya “lompatan iman”. Lompatan ini bersifat non - rasional dan biasa kita sebut pertobatan. Sehingga manusia dalam menyerahkan diri kepada tuhan tidak memiliki syarat tertentu, melainkan dengan kesadaran menyadari realitas yang ada. Manusia tidak merasa dalam keadaan terbelenggu.

Tahap religious merupakan hasil dari kristalisasi perjalanan hidup, yang akan melahirkan sikap bijaksana dalam individu. Seseorang yang mendapat konklusi dari dalam dirinya atau secara bahasa lain pengalaman pribadi akan lebih menyentuh pada ranah terdalam dalam diri manusia. Yang mana dalam perjalannya terdapat penyerahan, sehingga untuk memperoleh jalan terakhir untuk memperoleh ketenangan hidup hanyalah dengan menyatu dengan tuhan.

Sehingga manusia dalam menyerahkan diri kepada tuhan dituntut untuk menyerahkan diri secara terbuka tanpa ada rasa setengah hati. Individu disini memiliki keyakinan bahwa tuhan dapat menghapus penderitaan dan keputusasaan yang dialami manusia. Maka dari itu, istilah

pada situasi ini sebagai loncatan kepercayaan, disini menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk sampai pada tuhan yakni dengan kepercayaan atau iman. Sehingga manusia disini tidak mempunyai suatu formula yang objektif dan rasional, melainkan semua berjalan berdasarkan subjektifitas individu yang diperoleh hanya dengan iman.

B. Badan Keswadayaan Masyarakat

1. Pengertian

BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang merupakan lembaga kepemimpinan masyarakat yang bertugas untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan.²⁷ Badan keswadayaan Masyarakat sebenarnya bukan sebuah organisasi akan tetapi kesepakatan bersama dari masyarakat untuk bersatu sebagai sesama masyarakat disuatu kelurahan/desa untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Semua pihak yang tergabung dalam ini tidak boleh bertindak secara parsial, tidak mewakili golongan tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu yang bersifat impartial. Didalamnya ini terdapat 3 Unit Pengelola yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan). Didalam Unit Pengelolaan Keuangan inilah yang terdapat kegiatan pinjaman dana yang disebut dengan pinjaman bergulir.

²⁷ Muhammad Tammima Zuhri, *Op.Cit.*, h. 12

2. Dasar Hukum

Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

3. Fungsi dan Kedudukan Badan Keswadayaan Masyarakat

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga kepemimpinan pengentasan kemiskinan, tidak berarti harus terbentuk sebuah lembaga baru akan tetapi bisa mengoptimalkan dan memfungsikan lembaga yang telah ada sebelumnya. Lembaga yang ada tersebut harus memenuhi kriteria pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan:

- a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundangan atau peraturan pemerintah sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan masyarakat.
- b. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasi bersumber dari warga masyarakat setempat.
- c. Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi berada ditangan anggota.

- d. Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipasi.
- e. Berfungsi, diterima dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif dan *impartiality*)
- f. Pemilihan anggota melalui mekanisme proses pemilihan secara langsung oleh warga, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun.
- g. Kriteria keanggotaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan.
- h. Dibentuk secara partisipasi, demokratis dan inklusif.
- i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipasi, dan demokratis
- j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha, dan keluarga

4. Tujuan dari dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat

Tujuan dari dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat secara umum adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitor kebijakan dan aturan main secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk penggunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan fasilitas untuk menyalurkan aspirasi warga agar terbentuk transparansi masyarakat khususnya, dan pihak luar pada umumnya. Badan Keswadayaan Masyarakat bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pengembangan kelurahan pada umumnya.

Badan Keswadayaan Masyarakat adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut:²⁸

- a. Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, dan rencana strategi.
- c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan yang diambil.
- d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP.
- e. Mengawasi terlembaganya nilai nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.
- f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g. Membangun kerja sama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum).

5. Proses Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat

Beranggotakan warga komunitas yaitu diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama, unsur

²⁸ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.214-215

aparatur daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam kapasitas pribadi. Pimpinan harus dipilih dari dan oleh anggotanya. Dalam jangka panjang Badan Keswadayaan Masyarakat membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan dan kebutuhan bersama, serta pada saatnya akan memperkuat keswadayaan warga masyarakat.

6. Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan)

Unit Pengelolaan Keuangan adalah Unit Pengelolaan Keuangan yang merupakan badan pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin dengan pemberian pinjaman bergulir yang khususnya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.²⁹ Unit Pengelolaan Keuangan ini adalah urutan terakhir dari unit-unit pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat. Berikut penjelasan mengenai Unit-Unit Pengelola yaitu:³⁰

²⁹ Muhammad Tammima Zuhri, *Op.Cit.*, h.18

³⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Prosedur Operasional Standar(POS) Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan*, (Direktorat Jenderal Cipta Karya 2018), h. 3

a. Unit Pengelola

Dalam menjalankan kegiatannya Badan Keswadayaan Masyarakat dibagi menjadi 3 Unit Pengelola (UP). Ketiga unit tersebut adalah:

1) Unit Pengelola Lingkungan, kegiatan yang dilakukan adalah investasi infrastruktur yang dapat memberikan manfaat baik secara kolektif maupun individu dalam masyarakat. Investasi infrastruktur yang dilakukan adalah membangun fasilitas publik yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan lingkungan, sarana kegiatan masyarakat seperti rumah warga miskin, tempat pendidikan anak, jamban sehat. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang sudah ditemukan pada saat Pemerataan Swadaya dan berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas sebagai berikut :

- (a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat;
- (b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia Pembangunan;
- (c) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu;
- (d) Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya;

- (e) Menjalinkan kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi Unit Pengelola Lingkungan.
- 2) Unit Pengelola Sosial, kegiatan yang dilakukan oleh UPS adalah kegiatan yang berorientasi pada pelatihan lapangan kerja dan pelayanan sosial bagi warga miskin. UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas sebagai berikut:
- (a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia; Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat/Panitia bidang sosial;
 - (b) Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga
 - (c) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa;
 - (d) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dll; dan
 - (e) Menjalinkan kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPS (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) Badan Keswadayaan Masyarakat P2KP :3-4).
- 3). Unit Pengelola Keuangan, sudah dijelaskan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan ini adalah unit pengelola keuangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang melakukan kegiatan pinjaman dana bergulir.

Kuantitas Unit Pengelola Keuangan yang melaksanakan perguliran mencerminkan bahwa layanan jasa keuangan secara nasional meningkat. Kesempatan masyarakat mengakses layanan, pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjembatani masyarakat untuk mengembangkan bahkan memunculkan kreativitas bisnis baru dengan terfasilitasinya kebutuhan modal.³¹

Pengurus Unit Pengelola Keuangan yaitu manajer dan staf lainnya diangkat serta diberhentikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat melalui mekanisme Rapat anggota Badan Keswadayaan Masyarakat. Oleh karena itu secara struktural, pengurus Unit Pengelola Keuangan bertanggungjawab langsung pada Badan Keswadayaan Masyarakat. Sebagai unsur pengelola sumber daya, khususnya keuangan, Unit Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Badan Keswadayaan Masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat ke Kelompok Swadaya Masyarakat dan penggulirannya. Unit Pengelola Keuangan tidak dapat mengambil keputusan strategis, selain menjalankan keputusan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat.³²

1. Tugas utama Unit Pengelolaan Keuangan adalah:³³

- a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi,

³¹ Asiyah, B. N. A. B. N. (2015), *Sustainability Pinjaman Bergulir Unit Pengelolaan Keuangan PNPM Perkotaan Peluang Chaneling Bank Syariah*, Malia (Terakreditasi), 7(1), h. 96

³² Masitoh, N. S. R. E. (2015), *Pengaruh Perputaran Piutang Dan Efisiensi Modal Kerja Terhadap Kemampuan Laba Pada Unit Pengelolaan Keuangan Di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Purbayan, Gema*, 27(49), h. 1631.

³³ Muhammad Idris, *Op.Cit.*, h. 24

- b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi,
- c. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk Kelompok Swadaya Masyarakat administrasi keuangan,
- d. Menjalin kemitraan (*channelling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi Unit Pengelolaan Keuangan.

Unit Pengelolaan Keuangan kedepan diarahkan menjadi pelaksana mandat dari badan kerja sama antar desa untuk mengelola sistem pembangunan partisipasi yang telah terintegrasi dengan pembangunan regular, difungsikan dalam pengelolaan dana bergulir dan memperluas pelayanan bagi kelompok usaha.

Tahapan pengembangan kelembagaan Unit Pengelolaan Keuangan dimulai dari pembentukan Unit Pengelolaan Keuangan, memfungsikan Unit Pengelolaan Keuangan untuk kebutuhan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mendorong terjadinya proses pengakaran masyarakat dan penguatan legalitas Unit Pengelolaan Keuangan, serta pengembangan jaringan Unit Pengelolaan Keuangan.

Unit Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu unit yang telah dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tugas utama Unit Pengelolaan Keuangan adalah membantu dalam menyalurkan dana bantuan, dana bantuan ini berupa dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha produktif baik usaha baru maupun usaha berkembang. Dana pinjaman

bergulir merupakan dana pendorong bagi masyarakat agar partisipasi dalam mengelola dana abadi yang diberikan pemerintah. Dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat. Selain untuk menambah modal bagi masyarakat dalam usahanya, pinjaman bergulir juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Unit Pengelolaan Keuangan.

2. Dasar Pemikiran Unit Pengelolaan Keuangan

Dengan dasar pemikiran dirumuskan pokok-pokok kelembagaan Unit Pengelolaan Keuangan sebagai berikut:

- a. Musyawarah Antar Desa (MAD) membentuk badan kerja sama antar desa (sebagaimana dimaksud PP 72/2005) dengan menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dapat dikuatkan dengan notariat.
- b. Bentuk persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa dokumen yang ditandatangani pimpinan BPD (Sebagaimana dimaksud PP 72/2005).
- c. Dengan mandat teknis pengelolaan, Unit Pengelolaan Keuangan menjalankan fungsi pengelolaan keuangan mikro, penyaluran dana program, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat.
- d. Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat mendorong terbentuknya forum badan kerja sama antar desa, tingkat Kabupaten untuk tujuan membentuk jaringan kerja sama.

- e. Status kepemilikan seluruh hasil program pembangunan Kecamatan adalah milik masyarakat.

Penentuan standar pengelolaan perguliran harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:³⁴

1. Hasil Pemetaan Unit Pengelolaan Keuangan

Merupakan laporan kondisi terakhir Unit Pengelolaan Keuangan tentang saldo pinjaman, produktifitas asset, risiko pinjaman dan aspek kualitatif Unit Pengelolaan Keuangan.

2. Anggaran biaya operasional dengan ketentuan anggaran yang mencakup biaya operasional dan non operasional yang akan dikeluarkan dalam satu periode mendatang, musyawarah antar desa harus melakukan evaluasi anggaran biaya apakah realistis atau tidak sebelum melakukan persetujuan, estimasi pendapatan merupakan rencana pendapatan operasional maupun non operasional.

3. Tingkat pengembalian adalah realisasi pengembalian dibandingkan dengan target pengembalian, hal ini perlu dipertimbangkan karena berkaitan langsung dengan perputaran permodalan dan pendapatan jasa pinjaman.

4. Cakupan wilayah adalah wilayah pelayanan dan pembinaan Unit Pengelolaan Keuangan kepada kelompok yang menyangkut pertimbangan jarak antar lokasi, kondisi geografis, tingkat kesulitan pencapaian lokasi, dan tingkat keamanan wilayah.

³⁴ Sofian Ahil (2008), *Jurnal* <http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=3327> diaKelompok Sejahteraes pada tanggal 20-03-2020 pukul 15.00, h.31

Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terdapat standar pelaksana program yaitu dalam menjalankan peran sebagai pelaksana program partisipasi, Unit Pengelolaan Keuangan taat kepada prinsip, mekanisme, dan proses kegiatan sebagaimana telah dilakukan melalui program pengembangan kecamatan. Penyusunan standar pelaksana program mengacu kepada petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah antar desa.

Lembaga Pendukung yang secara khusus bertugas membantu kelancaran operasional Unit Pengelolaan Keuangan meliputi tim verifikasi badan pengawas Unit Pengelolaan keuangan dibentuk melalui musyawarah antar desa. Tugas dan tanggung jawab kelembagaan pendukung diatur dalam Anggaran Daerah (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).³⁵

1. Tim Verifikasi

Tim verifikasi berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan penilaian kelayakan usaha dan kelembagaan kelompok. Jumlah anggota tim verifikasi tergantung kebutuhan. Tim verifikasi bertugas membantu Unit Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan penilaian kelayakan kelembagaan dan permohonan pinjaman kelompok, memberikan rekomendasi kelayakan kepada Unit Pengelolaan Keuangan dan apabila diperlukan dapat membantu penyelesaian pinjaman bermasalah.

³⁵ *Ibid.*, h.33

2. Badan Pengawas Unit Pengelolaan Keuangan

Badan Pengawas Unit Pengelolaan Keuangan bertugas melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau *insidental*. Dalam hal kelembagaan, kegiatan dan keuangan Unit Pengelolaan Keuangan, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa.

a. **Proses Pelaksanaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat**

Pelaksanaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terdapat sebuah program yang bernama Pinjaman Bergulir. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir ini adalah suatu proses kegiatan penyaluran dana untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat yang bersifat pinjaman melalui pengajuan kelompok masyarakat baik usaha kelompok ataupun usaha mandiri serta kelompok penyalur, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat Rumah Tangga Miskin dengan cara memberikan bantuan modal berupa dana untuk membangun usahanya.³⁶

PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM–Pedesaan atau *Rural* PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur

³⁶ Departemen Dalam Negeri R.I, *Penjelasan X (Pengelolaan Dana Bergulir)*, (Jakarta: Tim Koordinasi Pnpm, 2011), h. 15

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI.

a. Keputusan Kelayakan oleh MAD

1) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan :

- (a) Besaran pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman untuk lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
- (b) Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*).

Ada beberapa keputusan kelayakan dalam pelaksanaan dana bergulir tersebut seperti jumlah jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman dan sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.

2) Jangka waktu pinjaman dan Frekuensi Pinjaman

Jangka waktu pinjaman maksimal dua tahun. Dengan jangka waktu tersebut diharapkan proses pembelajaran kepada Kelompok Swadaya Masyarakat dalam kegiatan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dapat tercapai. Adapun frekuensi pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan oleh Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan usaha-usaha Kelompok Swadaya Masyarakat dan berkelanjutan perguliran dana Bantuan Langsung Masyarakat. Untuk selanjutnya diharapkan Kelompok

Swadaya Masyarakat bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain atau dengan lembaga keuangan lain.³⁷

Angsuran Pinjaman Kelompok Swadaya Masyarakat dapat dilakukan berdasarkan perputaran dan kemampuan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat, yaitu pembayaran angsurannya dengan cara harian, mingguan, bulanan, atau musiman seperti peternakan, pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Meskipun pembayaran angsuran pinjaman juga diperkenankan musiman namun penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat tersebut maksimal sebesar 50% dari modal awal dengan tujuan agar kebutuhan Kelompok Swadaya Masyarakat terlayani dalam meningkatkan penghidupannya dan Unit Pengelolaan Keuangan tetap hidup sehat/*survive*. Apabila terjadi jumlah pembayaran pinjaman yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutannya: jasa pinjaman, pokok pinjaman yang tertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.

3) Pendanaan Pengguliran Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat³⁸

Mempertimbangkan keterbatasan dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPB, Unit Pengelolaan Keuangan dalam

³⁷ *Buku Pedoman PNPB Mandiri*, (Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Umum, Jakarta 2012), h. 25

³⁸ Permenkeu, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Dpu, 2007), h. 25

memberikan pelayanan dana pinjaman bergulir Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan ketentuan maksimum Rp 30.000.000,- untuk setiap kelompok dan maksimum Rp 2.000.000,- untuk setiap anggota Kelompok Swadaya Masyarakat.³⁹

- (a) Kelompok “Pemula” hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp 15.000.000,- perkelompok dan Rp 1.000.000,- per anggota.
- (b) Kelompok “Berkembang” diperbolehkan mendapat pinjaman kelompok maksimal Rp 50.000.000,- pendanaan perguliran dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
- (c) Kelompok “Matang” dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp 50.000.000,- dengan batas maksimal Rp 150.000.000,- . Khusus bagi kelompok *executing* yang telah ditetapkan dalam MAD, mereka dapat mengajukan pinjaman sampai dengan Rp 250.000.000.

Disimpulkan bahwa kelompok baru memiliki pinjaman maksimal Rp 15.000.000 perkelompok. Untuk kelompok berkembang maksimal Rp 50.000.000 pendanaan perguliran kelompok matang dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp

³⁹ *Buku Pedoman PNPM Mandiri, Op.Cit.*, h. 24

50.000.000 dengan batas maksimal Rp 150.000.000- Rp 250.000.000.

4) Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok yaitu:⁴⁰

(a) Kelompok penyalur (*channeling*) paling tidak dua kali angsuran dalam 12 bulan.

(b) Kelompok pengelola (*executing*) dapat diberikan pola sebagai berikut:

(1) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dan jasa pinjaman dibayar setiap bulan.

(2) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan.

(3) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaatan (harian, mingguan, atau bulanan)

Dapat disimpulkan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat menyediakan jadwal angsuran guna untuk menertibkan nasabahnya dalam membayar angsuran seperti penyalur memiliki jadwal 2 kali dalam 12 bulan atau per 6 bulan sekali. Dan untuk kelompok pemula terdapat tiga pola misalnya hanya membayar jasa simpanan dalam 12 bulan, angsuran pokok 12 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun, atau mereka bisa memilih

⁴⁰ Astiko & Sunardi, Pengantar Manajemen Dana Bergulir, (Yogyakarta: Andi, 1996), h.78

kapan jadwal harus membayar misanya (mingguan, harian, atau bulanan).

5) Penetapan Daftar Tunggu Kelompok

Usulan kegiatan pinjaman yang belum terdani baik dari Bantuan Langsung Masyarakat maupun dana perguliran dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu kelompok ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan didalam proses pelaksanaan dan bergulir ini untuk menjadi anggota dan pembentukan kelompok haruslah memenuhi syarat terlebih dahulu barulah bisa mengajukan pinjaman dana kepada Unit Pengelolaan Keuangan salah satu diantaranya adalah umur pembentukan kelompok harus sudah berjalan minimal kurang lebih 1 tahun, didalam pelaksanaan juga tak lepas dari forum MAD yang mengesahkan memilih keputusan pendanaan terhadap kelompok.

Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat hanya merupakan salah satu upaya dalam program PNPM Mandiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari

kemiskinannya. PNPM Mandiri hanya menyediakan alternatif kegiatan pinjaman bergulir, masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah akan menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program penanggulangan kemiskinannya. Penetapan kegiatan pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin diputuskan sendiri oleh masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Petunjuk teknis pinjaman bergulir ini merupakan penggabungan dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebelumnya yang merupakan edisi revisi mengatur mengenai kebijakan, pelayanan, *monitoring* dan sistem pelaporan yang wajib dilaksanakan agar pemberian pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik, tepat dan sasaran, sebagai acuan khusus bagi pelaku dan pengelola pinjaman bergulir dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri.

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan⁴¹:

(a) Lembaga Kesadayaan Masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat

Dalam kegiatan pinjaman bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

⁴¹ Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri)-Pedesaan, (Jakarta, 2012), h. 45-46

(1) Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Pedesaan dan memiliki anggaran dasar yang dalamnya antara lain menyatakan bahwa:

(a) Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, yang berupa kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada warga miskin untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro seperti: usaha ekonomi produktif, pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan modal ekonomi keluarga yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.

(b) Dana pinjaman bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan pinjaman bergulir saja

(c) Pendapatan Unit Pengelolaan Keuangan hanya untuk membiayai kegiatan operasional Unit Pengelolaan Keuangan dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya Lembaga Swadaya Masyarakat, sedangkan pengawas hanya bisa

dibiayai dari Laba bersih tahunan Unit Pengelolaan Keuangan.

(2) Lembaga Keswadayaan Masyarakat/ Badan Keswadayaan Masyarakat telah mengangkat pengawas Unit Pengelolaan Keuangan (2-3 orang) dan petugas minimal 2 orang. Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Pedesaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab.

(3) Lembaga Keswadayaan Masyarakat dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar pinjaman bergulir yang memuat kriteria Kelompok Swadaya Masyarakat dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota Kelompok Swadaya Masyarakat.

6) Tahap pencairan pinjaman⁴²

Berkas pinjaman tersebut diputuskan oleh manajer Unit Pengelolaan Keuangan, petugasnya kemudian memberitahu Kelompok Swadaya Masyarakat tentang putusan tersebut. Jika ditolak Kelompok Swadaya Masyarakat diberi tahu beserta alasan penolakan. Jika diterima Kelompok Swadaya Masyarakat diberi tahu mengenai perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan

⁴² *Buku Pedoman PNPM Mandiri, Op.Cit.*, h. 27

angsuran tersebut maka Unit Pengelolaan Keuangan menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang berisi surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000,00 dan bukti kas keluar Unit Pengelolaan Keuangan sebagai tanda penerimaan uang. Setelah Kelompok Swadaya Masyarakat memahami ketentuan pinjaman Kelompok Swadaya Masyarakat diminta menanda tangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar. Setelah itu petugas Unit Pengelolaan Keuangan menyerahkan dokumen tersebut kepada manajer Unit Pengelolaan Keuangan.

Manajer Unit Pengelolaan Keuangan kemudian meneliti dokumen yang diserahkan kemudian berkas pinjaman tersebut diadministrasikan. Setelah itu petugas sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan menyerahkan uang ke pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat menandatangani bukti kas keluar di mana uang bersama tindasan 1 bukti utang keluar diserahkan ke pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat dan asli disimpan sebagai bukti transaksi.

7) Tahap Pembinaan Realisasi

Bentuk pinjaman dilakukan dengan melakukan kunjungan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman. Kunjungan ke tempat usaha peminjam dilakukan dengan tujuan melihat perkembangan usaha peminjam makin berkembang atau makin menurun, melihat tujuan pinjaman

digunakan sesuai permohonan atau menyimpang, dan membantu mencairkan jalan keluar apabila terjadi kendala.

Berikut penjelasan dari pinjaman bergulir yang terdapat dalam Unit Pengelola Keuangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat;

b. Pinjaman Bergulir

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.⁴³ Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang berasal dari modal stimulan dana Bantuan Langsung Masyarakat yang disalurkan oleh Unit Pengelola Keuangan kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.⁴⁴

Tujuan dari pinjaman bergulir adalah untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meminimalkan pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional serta memberikan

⁴³ Ahma Hendra Setiawan, "Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", *Aset, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Vol. 11 No.2, September 2009, h. 110.

⁴⁴ Rahayuningsih, A. (2013), *Efektifitas Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan Pada Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011*, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 10(1), h. 83

kemudahan kepada masyarakat khususnya bagi Rumah Tangga Miskin.

Sementara ini, menurut Panggabean, tujuan dana bergulir adalah:⁴⁵

1. Menaikkan aktivitas ekonomi pedesaan maupun perkotaan
2. Meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM
3. Membangun kualitas sumber daya manusia
4. Muncul kembali semangat untuk berkoperasi
5. Meningkatkan pendapatan anggota

Pinjaman bergulir bukanlah satu-satunya sarana untuk meningkatkan pendapatan warga miskin, melainkan sebagai stimulan agar warga miskin mampu untuk berusaha keluar dari persoalannya. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari individu warga miskin itu sendiri merupakan modal yang paling utama. Pengelolaan yang baik dalam pemberian permodalan kepada masyarakat harus memberikan keuntungan. Prinsip-prinsip dalam pelayanan permodalan kepada masyarakat adalah *acceptable*: mudah diterima dan didayagunakan; *accountable*, dengan pengelolaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; *profitable*, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara *ekonomis*; *sustainable*, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri dan *replicable*, pengelolaan dana dan

⁴⁵ Fakhriy Naufal, *Evaluasi Program Dana Bergulir Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Studi Analisis Deskriptif di Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), h. 35

pelestarian hasil dapat dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas.⁴⁶

Prinsip tersebut akan mampu memberikan keberlangsungan usaha lembaga keuangan maupun usaha masyarakat yang didanai. Dalam pengelolaan pinjaman bergulir, memperhatikan berbagai hal terkait kinerja pinjaman bergulir. Unsur kinerja dalam pengelolaan Lembaga Keuangan termasuk perbankan diukur melalui analisis CAMEL (Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Likuiditas). Dalam pengelolaan Keuangan Mikro, kinerja diukur oleh pemahaman secara komprehensif terhadap filosofi pembiayaan usaha mikro berupa filosofi pemberdayaan usaha mikro yaitu; pertama, masyarakat yang pendapatannya (*lower middle income*). Masyarakat ini masih berpeluang untuk mengakses jasa keuangan komersial baik simpanan maupun pinjaman. Kedua, masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (*economically active poor*). Ketiga, masyarakat yang sangat miskin (*extremely poor*). Masyarakat belum tersentuh perbankan. Kegiatan simpan pinjam biasa dilakukan dengan lembaga keuangan informal seperti (rentenir, pengijon, pelepas uang lainnya) yang diperoleh dengan mudah, cepat dan tepat, dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.⁴⁷ Hal inilah yang dibutuhkan dalam kerangka lembaga keuangan mikro seperti halnya peranan pinjaman bergulir yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.

⁴⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan 2003, *Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta. Binti, h. 23

⁴⁷ Djoko Retnadi, (2006), *Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya*, Elex media Computindo, Jakarta, h.230

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha oleh Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dengan pinjaman dana bergulir ini memiliki kriteria penerima pinjaman dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada pengembangan penghidupan masyarakat miskin melalui kegiatan ekonomi produktif dan kreatif.⁴⁸ Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa:

- a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan tingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
 - b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja Unit Pengelolaan Keuangan serta *monitoring* partisipasi oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.
 - c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
1. Sasaran jenis Kelompok
- a. Kelompok Usaha Bersama yaitu kumpulan para peminjam/wirausaha yang mempunyai satu usaha dan dikelola secara bersama, dengan kriteria antara lain;

Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5-15 orang

 - 1) Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2

⁴⁸ *Buku Pedoman PNPM Mandiri, Op.Cit.*, h. 22-23

- 2) Usaha dikelola bersama antara anggota Kelompok Swadaya Masyarakat
 - 3) Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif
 - 4) Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)
 - 5) Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)
 - 6) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
 - 7) Mendapatkan persetujuan keluarga
 - 8) Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam tingkatan
 - 9) Harus disepakati oleh seluruh anggota
 - 10) Usahanya tidak termasuk *negative list*
- b. Kelompok Swadaya Masyarakat Sejenis yaitu kumpulan para peminjam/wirausaha yang mempunyai usaha sejenis dan/atau saling terkait dengan kriteria antara lain;
- 1) Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5-15 orang
 - 2) Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2
 - 3) Usaha dikelola bersama antara anggota Kelompok Swadaya Masyarakat
 - 4) Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif
 - 5) Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)
 - 6) Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)
 - 7) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
 - 8) Mendapatkan persetujuan keluarga

- 9) Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam tingkatan
 - 10) Harus disepakati oleh seluruh anggota
 - 11) Usahanya tidak termasuk *negative list*
- c. Kelompok Swadaya Masyarakat Aneka Usaha yaitu kumpulan para peminjam/ wirausaha yang mempunyai usaha beraneka ragam dalam satu kelompok dengan kriteria antara lain;
- 1) Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5-15 orang
 - 2) Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2
 - 3) Usaha dikelola bersama antara anggota Kelompok Swadaya Masyarakat
 - 4) Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif
 - 5) Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi)
 - 6) Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi)
 - 7) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
 - 8) Mendapatkan persetujuan keluarga
 - 9) Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam tingkatan
 - 10) Harus disepakati oleh seluruh anggota
 - 11) Usahanya tidak termasuk *negative list*

2. Fungsi kelompok⁴⁹

Sasaran fungsi kelompok dalam melayani dana bergulir dibedakan menjadi:

⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga*, h. 3

- a) Kelompok *channeling* (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan masyarakat kepada anggota tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pengelolaan Keuangan.
- b) Kelompok *Executing* (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat secara mandiri dengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaatan sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaatan.

Jadi dapat dibedakan bahwa kelompok *channeling* (penyalur) berfungsi sebagai lembaga penyalur yang memastikan penggunaan dana bergulir oleh anggota atau pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pendanaan sosial dasar, usaha, meningkatkan mekanisme tanggung renteng, kepatian penyaluran dan pengembalian dana bergulir. Kelompok *Executing* (pengelola) berfungsi memperkuat permodalan kelompok, memperluas pelayanan pinjaman, mempersingkat proses.

3. Ketentuan Dasar⁵⁰

a. Pelestarian Kegiatan dana Bergulir

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarahkan pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 4

b. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi Rumah Tangga Miskin

Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun tidak formal.

c. Pelestarian prinsip pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM Mandiri Pedesaan.

d. Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Pedesaan seperti: Unit Pengelolaan Keuangan, Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi dan sebagainya.

e. Pengembangan Kelompok

Dalam pengembangan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan perkembangan kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin.

c. **Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat**

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam suatu manajemen penyelenggaraan program. *Monitoring* pada dasarnya adalah upaya untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, strategi dan metodologi yang telah ditetapkan sehingga akan

menghasilkan kinerja, *output*, dan *outcome* yang diharapkan. Sedangkan evaluasi secara prinsip adalah mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan ketentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk itu pelaksanaan monitoring kegiatan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dilakukan oleh seluruh pelaku sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu:

- 1) Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan Kota, Kabupaten)
- 2) Konsultan, baik tingkat Pusat oleh KMP, tingkat KMW, Korkot, Askot, sampai fasilitator
- 3) Kelompok peduli tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten
- 4) Lembaga Donor, dan
- 5) Masyarakat

C. Kesejahteraan

1. Pengertian

Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan pada batasannya. Namun, menurut Islam kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkatan yang imbang (*balance*).⁵¹ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun

⁵¹ Masyhuri, *Op.Cit.*, h. 10

batiniah.⁵² Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia, dalam hidupnya kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi.

Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan sama dengan kepuasan karena berawal dari kebutuhan. Para ahli merumuskan dan menjelaskan komponen kebutuhan secara berbeda-beda menurut Masykoer Alie menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Kebutuhan *vital biologis* atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan dan kesehatan)
- b. Kebutuhan rohani (agama dan moral)
- c. Kebutuhan sosial *kultural* (pergaulan dan kebudayaan)

Menurut K.H Ali Yafi menjelaskan bahwa komponen biaya hidup sejahtera mencakup:

- a. Makanan pokok beserta lauk pauhnya (termasuk biaya pengolahannya sehingga berwujud makanan jadi).
- b. Pakaian yang dibutuhkan setiap musim (termasuk biaya penyiapannya)
- c. Tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya
- d. Perawatan kesehatan, pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan, pelayanan bagi yang sudah uzur, lansia dan pembinaan rumah tangga bagi yang memerlukannya.

⁵² Amirus Sodiq, *Op.Cit.*, h. 383

2. Konsep Kesejahteraan Menurut Islam

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan yaitu dalam surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”*. (QS. Quraisy [106]: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu: Menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.⁵³ Berkaitan dengan masalah penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dilihat dari menghilangkan rasa lapar sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya usaha yang didirikan berkat dana pinjaman dari Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya mengalami kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak harta yang melimpah. Namun hatinya selalu

⁵³ *Ibid.*, h.38

gelisah dan tidak pernah tenang. Padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada tuhan yang diaplikasikan penghambaan (ibadah) kepada -Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, itu menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan indikator kesejahteraan dan hendaknya itu bersifat cukup hanya untuk menghilangkan rasa lapar dalam artian kata tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pula merugikan orang lain demi kepentingan pribadi diri sendiri, melakukan kecurangan, dan sesuai dengan ketentuan agama. Jika hal ini dilakukan maka indikator ini terpenuhi dan tidak ada lagi tindak kekerasan maupun kejahatan.

Indikator ketiga adalah hilangnya rasa takut, ini menimbulkan rasa aman, nyaman dan damai. Ketika berada dalam suatu kondisi di mana masih banyak tindak kejahatan maupun kekerasan di mana kondisi ini akan menyebabkan ketidakamanan maupun kenyamanan maka kondisi ini bisa dikatakan belum sejahtera. Sebaliknya apabila tidak ada tindak kejahatan baik individu maupun masyarakat kondisi ini bisa dikatakan sejahtera.⁵⁴

Kesejahteraan Menurut BKKBN pada tahun 2014 adalah keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah,

⁵⁴ *Ibid.*, h.391

mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁵⁵

Menurut Prabawa kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk

⁵⁵ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 55

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.⁵⁶

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun, dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:⁵⁷ (1) Rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi

⁵⁶ Rambe, Armaini., *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2011), h. 64

⁵⁷ Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, (PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996), h. 151

spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan ke dalam dua tipe yaitu pertama, tipe keluarga pra - sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013 untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:⁵⁸

1. Kependudukan

2. Pendidikan

Ada 3 indikator yang dilihat yaitu: (1) Angka Partisipasi Sekolah (2) Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan (3) Angka buta huruf

3. Kesehatan

⁵⁸ Rosni, R., *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (Jurnal Geografi, 9(1), 2017), h. 58

Untuk itu dapat dilihat dari (a) Angka Kesakitan (b) Penolong Kelahiran (c) Angka Harapan Hidup

4. Fertilitas dan Keluarga Berencana
5. Pola Konsumsi
6. Ketenagakerjaan Status pekerjaan menjadi 7 (macam), yaitu berusaha sendiri berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga.
7. Perumahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima (5) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:
 - a. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah/pergi/bekerja/sekolah.
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan
 - 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
 - b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Anggota keluarga umur 10 - 60, bisa baca tulis latin.
- 8) PUS dengan anak hidup dua atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

c. Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio

d. Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial.

- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun lima tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Tahapan Keluarga Pra - Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I Yaitu keluarga mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*).
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

⁵⁹*Ibid.*, h. 59

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dengan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Pendidikan yang dimaksud disini adalah, pendidikan yang bersifat formal maupun non - formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan suatu penduduk di mana tingkat pendidikan yang tinggi dapat membentuk manusia terampil dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk..⁶⁰

Tingkat kesejahteraan dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga kecil. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh kepala rumah tangga dalam jangka waktu selama satu bulan untuk digunakan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 60

keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang yaitu dengan melihat pendapatan perkapita per bulan dari satu keluarga.

Keluarga sejahtera berarti semua jenis kebutuhan dapat dipenuhi secara seimbang dan berkelanjutan tanpa satupun kebutuhan yang terganggu. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tahapan yang dibuat oleh BKKBN yang mana terdapat indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Ada 5 (lima) tahapan dalam menentukan tingkat kesejahteraan antara lain tingkat prasejahtera, tingkat sejahtera I, tingkat sejahtera II, tingkat sejahtera III dan tingkat sejahtera III⁺. Setiap tahapan tingkat kesejahteraan tersebut mempunyai indikator yang berbeda-beda pula.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang

1. Sejarah Terbentuknya

Pada tahun 2007 sosialisasi mengenai proyek PNPM (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Pelaksanaan PNPM Mandiri berdasar kepada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25 /KEP/ MENKO/ KESRA/ VII/ 2007 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.⁶¹

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Relawan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan

⁶¹ Jayanti, P., *Op.Cit.*, h. 3

dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 tersebut dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan serta program pendukung seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/*sector* dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

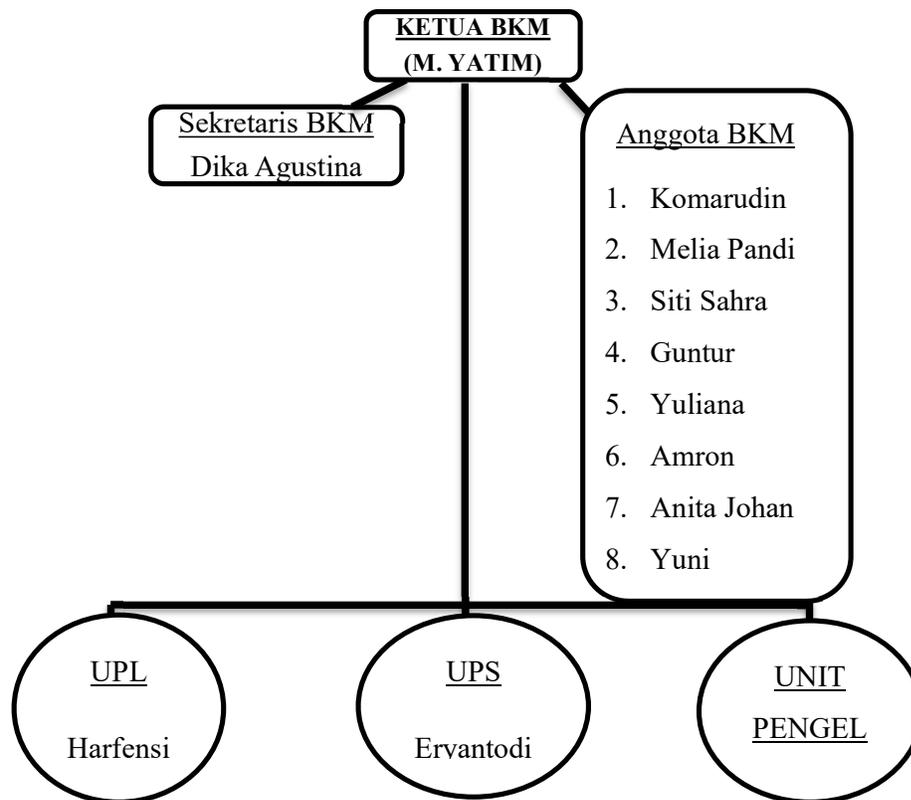
Pelaksanaan program ini ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat pada setiap kelurahan atau desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Intervensi PNPM yang dilakukan terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari miskin

menjadi berdaya, kemudian menuju Mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakat Madani. Saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan berhasil membangun pondasi masyarakat berdaya melalui perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Di dalam Badan Keswadayaan Masyarakat ini terdapat Unit-Unit Pengelola salah satunya adalah Unit Pengelolaan Keuangan atau disebut dengan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Dari program PNPM Mandiri yang mendirikan suatu lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat ini terdapat struktur kepengurusan beserta unit-unit pengelola. Berikut ini adalah struktur Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur yang berdiri di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Grafik 3.1

Struktur Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur

Desa Suka Datang⁶²

Tujuan dari dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat secara umum adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitor kebijakan dan aturan main secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk penggunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Badan Keswadayaan Masyarakat berkewajiban memberikan fasilitas

⁶² Dokumen sekretariat BKM Jaya Makmur Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara, diambil pada tanggal 20 Februari 2020

untuk menyalurkan aspirasi warga agar terbentuk transparansi masyarakat khususnya, dan pihak luar pada umumnya. Badan Keswadayaan Masyarakat bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pengembangan kelurahan pada umumnya.

Pada tanggal 20 Januari tahun 2009 telah berdiri lembaga Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan di Desa Suka Datang dengan nama Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur. Tujuan didirikannya adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dana pinjaman melalui program Unit Pengelolaan Keuangan dengan sistem pinjaman berkelompok. Awal dari dana tersebut hanya Rp 25.000.000,- namun kenyataan membawa perubahan dan dana hasil pinjaman masyarakat berjalan baik sehingga uang khas bertambah. Pinjaman tersebut disebut dengan pinjaman bergulir. Jumlah anggota dari golongan peminjam ini pada awalnya hanya berjumlah sekisar 45 orang dengan 9 Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu Pada tahun 2009-2012, kemudian pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan pada pengelolaan keuangan oleh pengurus Unit Pengelolaan Keuangan, sehingga banyak menutupi kerugian yang terjadi akibat banyaknya masyarakat yang meminjam berhenti melakukan angsuran dan mulai acuh, akibatnya pengurus Unit Pengelolaan Keuangan sebisa mungkin mengambil keuntungan dari hasil bunga yang diperoleh untuk membuat Unit Pengelolaan Keuangan tetap

berjalan, pada saat itu peminjaman dikhususkan pada masyarakat miskin namun karena gagal oleh sebab itulah berubah menjadi sedikit bebas bukan hanya diperuntukkan warga miskin namun menyeluruh/merata, itulah mengapa harus dibuat kelompok agar dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan masyarakat kalangan bawah dan bisa saling membantu. Pada tahun 2016 terjadi penyuntikan dana dari PNPM sehingga turun Rp 100.000.000,- untuk lembaga Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat langsung. Lembaga ini menawarkan kembali dan memberi tahu kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana pinjaman. Tahun 2016-2018 seiring berjalannya waktu kondisi keuangan Unit Pengelolaan Keuangan kembali membaik, dan kelompok peminjamnya bukan orang-orang yang sudah meminjam pada tahun yang sudah, karena pengurus Unit Pengelolaan Keuangan selektif dalam memilih kelompok peminjam yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan.

Pada tahun 2019-2020 masyarakat peminjam di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang sekarang menjadi 40 orang. Sebagian sudah tidak menggunakan jasa Unit Pengelolaan Keuangan lagi karena semakin bertambahnya kebutuhan produksi yang harus ditingkatkan penjualannya dan lebih banyak membutuhkan modal sedangkan di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat memiliki kapasitas pinjaman yang tidak sama dengan lembaga keuangan Bank. Pada tahun 2020 ini Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di Desa Suka datang terbagi menjadi 4 Kelompok Swadaya Masyarakat, yaitu terdiri dari Kelompok

Swadaya Masyarakat Bahagia, Kelompok Swadaya Masyarakat Kamboja, Kelompok Swadaya Masyarakat Anggrek, dan Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra. Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra terdiri dari golongan Petani yaitu sekitar 15 orang, Kelompok Swadaya Masyarakat Kamboja berasal dari pedagang 15 orang, Kelompok Swadaya Masyarakat Anggrek dari golongan tukang ojek 5 orang, dan Kelompok Swadaya Masyarakat Bahagia dari golongan peternak ayam dan itik serta percetakan batu bata terdiri dari 5 orang.

Dalam sejarahnya Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang telah mengalami dua kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Yuli Jumianti dan Erfendi (2009-2015)
- b. Solihin dan Melinda (2016-2020)

Sampai dengan tahun 2020 Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur di Desa Suka Datang mampu terus eksistensi walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi untuk tetap bisa mempertahankan lembaga tersebut yang sekarang dipimpin oleh Ketua Bapak Solihin dan Sekretaris Melinda, kepengurusan pinjaman tersebut yang sekarang kebanyakan dari anggota lama sebagian hanya sekitaran 5 orang yang baru. Pinjaman yang diberikan sudah hampir Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000,-/orang. Itu pun diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya memang angsurannya lancar, bagi yang macet tetap diberikan jumlah minimal Rp 500.000,-. Karena pinjaman yang diberikan adalah Rp 500.000,- sampai Rp 2.000.000,-. Jika mengalami peningkatan terhadap masyarakat yang meminjam, yaitu kegiatan

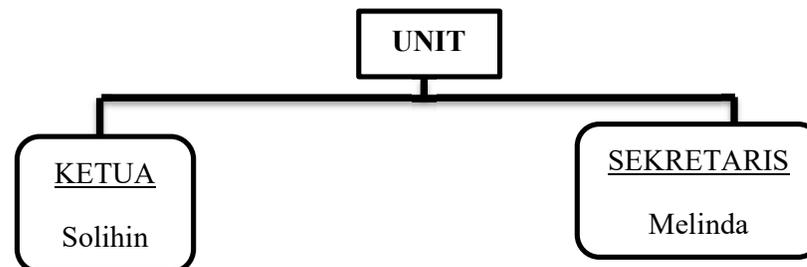
angsuran lancar maka dapat bertambah lagi batas maksimum Rp 5.000.000,- /orang. Golongan kelompok peminjam yang benar-benar masih aktif adalah 4 Kelompok Swadaya Masyarakat.⁶³

Pengelolaan berorientasi pada penciptaan peluang, peningkatan pendapatan dan kegiatan produktif lainnya. Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai pengawas dan penentu kebijakan, Unit Pengelolaan Keuangan sebagai pengelola pinjaman bergulir dan bertanggung jawab kepada Badan Keswadayaan Masyarakat.

Grafik 3.2

Struktur Unit Pengelolaan Keuangan⁶⁴

(Unit Pengelolaan Keuangan)



Didalam Unit Pengelola Keuangan ini Pengelolaan dana di tingkat pusat : semua dana bantuan dan pinjaman Bank Dunia untuk keperluan PNPM ditransfer ke rekening bantuan PNPM di Bank BRI. Unit Pengelolaan Keuangan Badan keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur yang terletak di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara ini telah memiliki beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat. Dari Segi keanggotaannya juga semua asli berasal dari Desa Suka

⁶³ Wawancara, Solihin (Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur) Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, 02 Februari 2019, Pukul 16.00 WIB

⁶⁴ Dokumen sekretariat BKM Jaya Makmur Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara, *Loc.Cit.*,

Datang, dan ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini bekerja di bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan hanya bekerja sebagai petani dan Ibu Rumah Tangga, mereka menjalani aktivitas seperti biasa, jika di desa mereka tetap menjalankan tugasnya masing-masing didalam program Unit Pengelolaan Keuangan tersebut.

2. Visi Misi Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang

a. Visi dan Misi Unit Pengelola Keuangan

- 1) Visinya adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarya dan mandiri
- 2) Misinya dalam kegiatannya untuk mewujudkan:
 - (a) Memfasilitasi kepentingan masyarakat kecamatan secara keseluruhan
 - (b) Memfasilitasi kegiatan masyarakat miskin dalam layanan permodalan usaha
 - (c) Peningkatan produk unggulan daerah
 - (d) Perluasan jaringan kerja

b. Visi dan Misi Badan Keswadayaan Masyarakat:

- 1) Misi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah untuk menumbuhkan kembali ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.
- 2) Berperan sebagai motor penggerak dinamika pembangunan di masyarakat, terutama dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya, menjadi

semakin berarti, melalui tugas dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan

- 3) Visi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah menjunjung tinggi asas keadilan, keguyuban, keselarasan kaum lelaki dan perempuan, kemitraan, dan kesederhanaan, menyelesaikan masalah tanpa masalah.
- 4) Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai kumpulan warga yang dipercaya, yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kapasitas sendiri maupun untuk mengakses peluang program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata baik, sehat dan berkualitas.⁶⁵

3. Mekanisme Hutang - Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara

- a. Gambaran umum pelayanan pinjaman anggota Kelompok Swadaya Masyarakat:
 - 1) Badan Pengurus (Unit Pengelola Keuangan) berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar).
 - 2) Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya Jasa Administrasi sebesar 1.5 % per - bulan.

⁶⁵ *Ibid.*

- 3) Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor oleh Unit pengelola Keuangan dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai.
- 4) Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor oleh Unit pengelola Keuangan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari RT RW setempat dengan setempel RT. Tanpa ada rekomendasi RT maka pinjaman tidak bisa dicairkan
- 5) Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Secara umum pelaksanaan hutang - piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, disetujui oleh rekomendasi dari Kepala Desa/RT setempat, serta pengembalian hutangnya. Dan besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditentukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat. Biasanya bagi Kelompok Swadaya Masyarakat peminjam pertama diberikan pinjaman Rp.500.000,- diangsur dalam satu tahun, kalau angsurannya lancar maka Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut berhak

mengajukan pinjaman lagi dengan besaran pinjaman menjadi RP.1.500.000, dan berikutnya sampai batas pinjaman Rp.2.000.000,- kalau melebihi jumlah tersebut Kelompok Swadaya Masyarakat disarankan untuk mengajukan pinjaman di luar Badan Keswadayaan Masyarakat bisa di Bank.

Pengajuan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan anggota 4 sampai 10 orang atau lebih. Seperti apa yang telah di katakan oleh Solihin selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur, mengatakan “Dalam pengajuan hutang tidak bisa hanya seseorang melainkan harus berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, jadi pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat tidak sama dengan pinjaman di Bank, harus membentuk sebuah kelompok.”⁶⁶

⁶⁶ *Buku Pedoman PNPM Mandiri, Op.Cit.*, h. 15

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis di Desa Suka Datang mengenai lembaga Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Suka Datang dapat dilihat keberadaannya sebagaimana seorang informan menjelaskan apa itu Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat, berikut hasil wawancara:

Unit Pengelolaan Keuangan tu sebagai perpanjangan tangan untuk pengelolaan dana, jadi untuk laporan yang telah dibuat adalah tugas dan tanggung jawab dari si pengelola. Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini salah satu pelaksana program PNPM Mandiri. Keberadaannya bukan muncul begitu saja tapi karena respons dari kebutuhan masyarakat akan suatu wadah yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam PNPM Mandiri. Dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat hadir berbentuk organisasi warga yang bersifat kolektif. PNPM sendiri mewajibkan dalam salah satu tahapan siklusnya untuk melakukan pembentukan organisasi ini sebagai hasil dari dilaksanakannya pengorganisasian masyarakat. Sosialisasi dari Unit Pengelolaan Keuangan atau pemerintah tentang Unit Pengelolaan Keuangan yang ada di desa Suka Datang telah terlaksana dan diberitahukan sebagaimana dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Awal dari Unit Pengelolaan Keuangan di desa ini karena ada pendataan masyarakat miskin atau yang disebut dengan Pemetaan Swadaya (PS), namun terjadi

kemacetan atau gagal, tidak bisa bertahan lama akhirnya sekarang dibebaskan yang mau pinjam. Jangka waktu pinjaman Kelompok Swadaya Masyarakat disesuaikan dengan kondisi usaha dan kemampuan membayar kembali. Di desa Suka Datang telah diterapkan dengan angsuran membayar selama 10 bulan, tapi tergantung juga pada kemampuan membayar anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Syarat untuk melakukan pinjaman

- a. Harus mempunyai usaha atau baru ingin memulai usaha
- b. Analisa usaha dan kemampuan membayar
- c. Harus membuat proposal (Berkelompok), contoh proposalnya akan diperlihatkan kepada calon peminjam
- d. Foto *copy* KTP dan KK masing-masing anggota kelompok
- e. Minimal 1 kelompok terdiri dari 4 orang, maksimal 10 orang
- f. Surat kuasa pencairan tabungan
- g. Telah memahami aturan dasar pinjaman bergulir yang memuat kriteria kelompok yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, sistem angsuran pinjaman, pembinaan pinjaman, penyelesaian pinjaman bermasalah serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota Kelompok.⁶⁷

Jadi maksudnya adalah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini pengorganisasian masyarakatnya yang dibentuk dari Unit Pengelolaan Keuangan itu sendiri bukanlah sebagai tempat berorganisasi masyarakat setempat tetapi lebih ke wadah pemersatu warga wilayah tersebut secara bersama-sama bersatu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya Golongan penerima pinjaman ini juga dibebaskan tidak mesti diperuntukkan warga miskin saja karena pernah gagal dan macet akhirnya dibebaskan maksudnya disini bukan berarti seenaknya namun lebih kepada kriteria orang-orang yang bisa dan sanggup mengelola keuangan tersebut dengan baik dan benar dan juga ada

⁶⁷ Solihin (Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB

kemampuan untuk membayar. Serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan peminjaman.

Selain dari si pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat penulis juga mewawancarai beberapa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat yang meminjam di Desa Suka Datang, berikut hasil wawancara dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra yang berasal dari golongan Petani (Hortikultura+Palawija) dalam menyejahterakan aspek produksinya:

Susilawati dari Petani cabe berinforman:

Unit Pengelolaan Keuangan kalo menurut saya tu suatu program yang memberi dana pinjaman. Tau Unit Pengelolaan Keuangan ini dari teman-teman yang lain yang sudah pernah pinjam jadi dikasih tau kalo misal mau pinjam di dusun sendiri bisa coba ajukan di Unit Pengelolaan Keuangan dengan ketua nya yang namanya Solihin. Dari situlah mulai mencari tahu bagaimana persyaratan kalo mau pinjam di sana. Katanya dipermudah tapi harus membentuk kelompok karena kalo sendiri tidak bisa dikasih jadi ada tanggung jawabnya sama - sama saling membantu dan mengingatkan kalo sudah pinjam jangan lupa bayar angsuran dengan ketua kelompok masing – masing nanti ketuanya menyetor dengan pengurus Unit Pengelolaan Keuangan. Kendala meminjam tidak ada karena tidak banyak aturan tidak ada pakai jaminan anggunan. Semenjak pinjam duit Unit Pengelolaan Keuangan ada duit tambahan modal untuk beli pupuk, bibit yang lebih berkualitas dari sebelumnya jadi cabenya lebih subur atau besar dan lebih banyak ketika dijual dipasar ada sekali panen waktu sudah pinjam dana ini kadang dapat Rp 3.500.000-Rp 4.000.000,-/10 hari panen dalam setahun bisa 20 kali panen tergantung perkembangan, kualitas cabe dan jenis cabe. Kalo harga cabe mahal bagus untuk petani. Terus juga kalo ado hama yang merusak pendapatan menurun. Sampai tahun ini masih lanjut pinjam dana di Unit Pengelolaan Keuangan karena bisa membayarnya sesuai kesepakatan bersama, paling lama 20 bulan.⁶⁸

⁶⁸ Susilawati (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 WIB

Ibu Anisa dari Petani tomat juga berargumen:

Unit Pengelolaan Keuangan itu pinjaman dana. Nama pinjamannya dana bergulir. Ada pakai bunga juga 1,5. Seperti saya kan seorang petani tomat yang mempunyai lahan sekitar 1/4hektar kadang dalam setahun cuma 6 kali panen 6 kotak tomat kadang juga gagal panen. Pinjam dana di Unit Pengelolaan Keuangan cuma bisa menutupi modal awal - awal saja setelah sebulan kedepan cuma cukup untuk bayar iuran angsuran pinjaman kadang duit pinjamannya terpakai untuk kebutuhan makan sehari-hari juga karena keterbatasan hasil keuntungan dari tanaman tomat tadi, tomat ini kadang tidak ada harga (murah). Kemarin menabur bibit mati. Akhirnya terpaksa coba menanam kacang nanti mau coba menabur bibit tomat lagi pakai duit pinjam ini masih ada sisa. Kadang laki kerja cari duit upah atau ikut - ikut orang untuk menutupi angsuran. Unit Pengelolaan Keuangan juga sering menagih ke rumah kalau telat bayar, karena dana itu mau digulirkan lagi kadang belum bisa bayar tapi masih diberi keringanan sampai berapa bulan lagi, itu enaknya Unit Pengelolaan Keuangan. Saya tahu Unit Pengelolaan Keuangan kemarin karena beritahu dengan yang sudah pernah pinjam juga disana.⁶⁹

Bapak Jumikun dari Petani padi selaku informan menjelaskan:

Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat menurut saya adalah tempat pinjam modal untuk usaha. Sistem pinjamannya berkelompok yaitu harus membuat Kelompok Swadaya Masyarakat. Pertama kali saya meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan itu karena Unit Pengelolaan Keuangan melakukan kegiatan kumpulan/rapat dibalai desa mengenai lembaga pinjaman tersebut. Saya jadi tertarik karena tidak perlu lagi repot-repot keluar desa dan pinjaman yang diberikan juga bisa sesuai kesepakatan kemampuan kita dalam membayar sedikit diringankan. Apalagi kalau di desa sendiri dan sudah saling mengenal watak satu sama lain pasti mau membantu. Saya selaku petani padi merasa terbantu dengan Unit Pengelolaan Keuangan ini. Kadang mau bercocok tanam itukan perlu tambahan modal, mengandalkan duit sendiri kadang tidak cukup. Waktu mau pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan dan mencoba untuk mengajukan akhirnya terpilih dan dicairkan duitnya. Sampai saat ini saya masih pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan dan keuntungan dari hasil tanam padi jadi bertambah karena tambahan modal dari pinjam tadi tanaman subur hasil yang didapat lumayan banyak sehingga bisa mengupah orang, beli pupuk, upah bajak. Tertarik pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan karena pelayanan

⁶⁹ Anisa (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 WIB

yang dikasih lumayan enak tidak terlalu dibebankan dengan yang pinjam. Bisa bayar sebagian dulu.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan dari Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya hanya dari golongan Petani Cabe dan Petani Padi sedangkan golongan Petani tomat sama sekali tidak membawa perubahan bahkan adanya kerugian sehingga petani tomat suka menunggak iuran pinjamannya. Golongan Petani cabe dan dan Petani Padi membawa perubahan yang bagus setelah meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan, karena kebutuhan mereka menjadi terpenuhi tanpa mengganggu uang angsuran untuk membayar hutang pinjaman. Hasil yang didapat mulai dari bisa mengupah orang lebih banyak juga bisa membeli pupuk yang berkualitas sehingga perekonomian menjadi meningkat, dan modal bisa diputar kembali.

Selain dari Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra penulis juga mewawancarai Kelompok Swadaya Masyarakat Anggrek yang terdiri dari golongan Tukang Ojek, berikut hasil wawancara:

Unit Pengelolaan Keuangan ini tempat pinjam duit, alasan tertarik pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan karena tidak ada denda sedangkan kalo pinjam di tempat lain pakai denda kalo telat bayar terus bunganya lebih besar kalo di Unit Pengelolaan Keuangan telat bayar atau tidak, dia tidak bertambah, bunganya masih tetap. Dulu tau Unit Pengelolaan Keuangan dari tetangga terus dikasih tau kalo mau pinjam di dusun ada walaupun bunganya sedikit besar tapi bayarnya bisa sesuai kehendak kita dan kesepakatan.

⁷⁰ Jumikun (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB

Mulai dari melengkapi persyaratan dipermudah tidak terlalu sulit nian cuma sedikit sulit ketika mengembalikan angsuran. Sudah dua kali ini pinjam, belum tahu mau pinjam lagi apa tidak tahun depan. Duit pinjaman kemarin dipakai modal ngojek tapi lebih banyak untuk kebutuhan sekolah anak. Sekarang sepi ojek sudah kalah dengan grab ojek online dan corona. Kegiatan sehari-hari cuma ojek hampir 5 tahun, 2 tahun ini baru pinjam Unit Pengelolaan Keuangan masih seperti ini tidak ada perubahan pendapatan kadang sehari Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- pinjam duit di Unit Pengelolaan Keuangan kadang cuma untuk menutupi duit bensin dan makan saja di luar sama saja malah kadang menurun dari biasanya rugi minyak bensin bolak balik cari penumpang, mangkal saja tidak temu nanti penumpangnya jadi mau keliling juga, sebulan dua bulan sudah pinjam ada bertahan duit itu sudah habis duit banyak terpakai untuk makan sehari-hari.⁷¹

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat Anggrek yang tergolong dari kalangan Tukang Ojek tidak sejahtera dalam meningkatkan perekonomiannya. Tidak ada perubahan yang baik, mereka hanya mengandalkan hasil ojek di mana tidak ada banyak keuntungan yang didapatkan sehingga dana pinjaman yang mereka pinjam kebanyakan untuk makan sehari-hari bukan untuk aspek produksi. Di situ letak mereka tidak sejahtera dalam menggunakan Unit Pengelolaan Keuangan karena tidak bisa memutar kembali modal yang dipinjam.

Penulis melakukan wawancara kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Bahagia yang terdiri dari golongan usaha Percetakan Batu Bata dan Peternakan Itik & Peternak Ayam, berikut hasil wawancara kepada salah satu nasabah percetakan batu bata:

⁷¹ Ansori (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB

Unit Pengelolaan Keuangan ini kan dari Badan Keswadayaan Masyarakat. Jadi emang ada anggota-anggota/kelompok yang sudah buat organisasi masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat di desa dengan cara bersama-sama membangun lingkungan yang bersih dari kemiskinan, sama-sama bergerak untuk bisa meningkatkan pendapatan terutama dari hasil usaha yang dimiliki. Salah satunya seperti saya mempunyai usaha Percetakan Batu Bata, sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat saya sangat peduli dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari anggota kelompok ini. Awal pinjam Rp 500.000,- sampai bertahap Rp 5.000.000,-. Karena keterbatasan dana yang ada di Unit Pengelolaan Keuangan, jadi cuma sebatas Rp 5juta pinjamannya. Itupun dikasih karena kami lancar terus bayar walaupun ada telat sedikit tapi sesuai dengan jatuh tempo kami selesai semua bayar. Kalo kelompok kami kemarin terakhir pinjam dapat Rp 5Juta per orang, mau pinjam lagi karena mau tambah modal lagi untuk beli mesin jadi disuruh menyambung langsung ke bank karena hampir Rp 20juta jadi pihak Unit Pengelolaan Keuangan tidak bisa karena berpengaruh juga nanti dengan anggota yang lain akhirnya dibantu oleh Faskel Unit Pengelolaan Keuangan (pembimbing/pengawas), mulai dari berkas - berkasnya diurus dan dibantu oleh Faskel kami cuma tanda tangan berkas - berkasnya dan disuruh belajar memahami bagaimana debit kredit tentang lembaga keuangan yang selama ini dipinjam dan harus tau juga bagaimana lembaga keuangan bank dan masih banyak lagi, berjalan selama sebulan belajar. Kemudian sebulan lagi sudah paham baru dites terus baru bisa dicairkan. Lama prosesnya di situ kendalanya mau pinjam lagi agak ruwet. Cuma sudah dapat sekali di bank ini tidak ada lagi pakai pembimbing/pengawas yang menemani kebank, jadi langsung sambung saja kalo mau ambil pinjaman lagi, karena kini sudah beralih menjadi tanggung jawab pihak bank. Dengan adanya Unit Pengelolaan Keuangan alhamdulillah bisa sampai pada tahap ke bank dengan pinjaman sebesar itu sehingga bisa beli mesin dan juga mobil untuk muat barang, sebelum pinjam Unit Pengelolaan Keuangan cuma bisa dapat produksi 1000 bata sehari, sudah pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan bisa 2000 bata/hari karena ada tambahan karyawan tadi biasanya cuma bisa mengajak orang tiga sekarang bertambah tiga orang lagi jadi bisa membantu juga perekonomian masyarakat yang menganggur di dusun. Semenjak ada mesin jadi tambah lagi hasil produksi.⁷²

⁷² Muhamammad Amin (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB

Penulis juga mewawancarai seorang Peternak Ayam dari nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang:

Inti dari Unit Pengelolaan Keuangan untuk membantu masyarakat menambah modal, sehingga dari pembayaran iurannya itu jika lancar bisa dikumpulkan dan dilanjutkan digulirkan ke Kelompok Swadaya Masyarakat lain. Persyaratannya juga dipermudah tidak terlalu ada kendala. Ada terjadi kemacetan juga sekali dua kali yang namanya usaha pasti tidak mulus saja apalagi saya kan bergerak bidang ayam jadi ada jual beli ayam potong dan jual beli ayam hidup, jualannya di pekan - pekan. Kadang barang tidak habis kadang jual murah sehingga cicilan tadi telat bayar. Tapi alhamdulillah dari hasil pinjam kadang bisa menutupi kerugian jualan, bisa tambah modal lagi dari penghasilan kadang cuma Rp 100.000,- ada bertambah Rp 150.000,-/hari. Saya tau Unit Pengelolaan Keuangan dari teman-teman yang lain mereka mengajak untuk coba mengajukan pinjaman akhirnya dapat, terus juga lancar tidak lewat sampai jatuh tempo. Karena kalo telat bayar sebulan tidak apa yang penting jangan telat sampai jatuh tempo, malu sendiri nanti kalo hutang belum dibayar duit itu juga mau digulirkan ke kelompok yang lain⁷³

Selanjutnya dari Peternak Itik, berikut hasil wawancara:

Modal awal dulu yang aku dapat dari ternak itik dari tangan aku sendiri cuma ada duit 500.000. Karena kebutuhan yang terus meningkat dan banyak juga peminat dari ternak itik yang menghasilkan telur, aku berinisiatif untuk menambah modal beli itik lagi biar bertambah banyak lagi telur untuk dijual sehingga mendapatkan lebih banyak keuntungan. Satu telur dengan harga Rp 2000. Sebelum pinjam kemarin iya cuma ada 10 ekor itik sesudah pinjam bertahap kemudian sampai bisa tambah itik lagi sekitar 30/32 itik, sehari bisa bertelur 20/25 butir telur. Waktu itu tau Unit Pengelolaan Keuangan karena orang tua pernah ikut rapat di balai mengenai lembaga keuangan yang memberikan program pinjaman bergulir, pinjaman itu bisa sesuai dengan kesepakatan kita dalam membayar mampu berapa bulan, dari situ aku tertarik untuk coba buka usaha lebih besar lagi apalagi baru sudah tamat kuliah belum ada kerja akhirnya coba terjun buat usaha ternak itik yang sebelumnya emang sudah memelihara itik.

⁷³ Rizal (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 WIB

Akhirnya sampai sekarang usaha ini masih berlanjut. Jadi bisa untuk menambah kebutuhan sendiri, bantu bayar sekolah adik sedikit ringankan beban orang tua. Dari segi kendala mau mengajukan tidak terlalu sulit, dari mau bayar iuran bulanan angsuran juga alhamdulillah tidak ada hambatan lancar terus. Dengan adanya Unit Pengelolaan Keuangan sangat terbantu, dari aku ada modal cuma sedikit semenjak jadi nasabah Unit Pengelolaan Keuangan bisa tambah modal lagi jadi banyak keuntungan yang aku dapat. Pengurus ketua Unit Pengelolaan Keuangan juga dekat, dia ramah baik bisa saling mengerti dan memahami bagaimana karakter orang-orang yang ada di desa Suka Datang, jadi bukan sekedar mau tau kalo Unit Pengelolaan Keuangan tempat pinjam tapi dari cara pengurusnya memberikan pelayanannya mau dilihat juga kemasyarakatnya bagaimana dan bisa meyakinkan kalo dana itu emang dana bantuan untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin namun bantuan dana tersebut untuk buat usaha biar masyarakat miskin tidak berhenti di situ saja tidak cuma dapat bantuan kebutuhan sehari-hari duit itu tapi bisa putar lagi modal usaha untuk mencukupi sehari-hari. Kadang masyarakat terlalu meremehkan pinjaman itu, padahal nanti pasti ada hal yang menghambat mereka misal mau pinjam lagi pasti susah.⁷⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat Bahagia semuanya sudah sejahtera karena memiliki perkembangan dan peningkatan yang cukup baik. Terjadi pengembangan dan perbedaan yang sangat drastis ketika sebelum dan sesudah adanya Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat. Dari Percetakan batu bata bahwa pinjaman di Unit Pengelolaan Keuangan sangat berpengaruh positif, usahanya semakin berkembang dan banyak menghasilkan keuntungan baik dari nasabah Unit Pengelolaan Keuangan maupun dari masyarakat yang bekerja pada percetakan batu bata tersebut menjadi terbantu dari segi perekonomiannya juga. Kemudian bahan atau alat

⁷⁴ Ade Sanjaya (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Tanggal 12 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB

pembuat batu bata juga semakin meningkat sehingga yang dihasilkan juga banyak berkat dana pinjaman Unit Pengelolaan Keuangan dalam pinjaman ke bank. Hingga mereka dialihkan pinjaman ke bank itu berarti pinjaman yang mereka pinjam sudah sangat besar dan Unit Pengelolaan Keuangan sudah sangat membantu hingga dana tersebut mencapai batas maksimum. Kemudian dari Peternakan Ayam dan Itik mereka juga menghasilkan keuntungan disetiap harinya dengan perkembangan yang sangat bagus dari hasil jual ayam potong dan ayam hidup serta Itik yang bertelur setiap harinya. Sehingga mereka bisa lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bayar iuran angsuran pinjaman, serta dari Peternak Itik pun bisa membantu bayar uang sekolah adiknya dan juga membantu kebutuhan orang tua.

Penulis juga mewawancarai Kelompok Swadaya Masyarakat Kamboja yang berasal dari golongan Pedagang yaitu Warung Manisan dan Dagang Sayur pasar subuh, berikut hasil wawancara kepada Ibu Subaida selaku pemilik Warung Manisan:

Unit Pengelolaan Keuangan menurut saya program yang memberikan pinjaman dana, disitu ada bunganya 1,5%. Enak pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan kita bisa bayar setengah dulu kapan mau kita bayar misal 10bulan angsuran kalo telat sebulan dua bulan tidak apa sampai kapan kita bisa bayar kita bayar sampa jatuh tempo. Tidak terlalu seperti di bank kan kadang ditagih terus kalo menunggak bunga bertambah. Kalo ini tidak masih tetap sama, tidak pakai anggunan, jadi tidak ada terlalu banyak dibebankan paling cuma mikir cara membayar angsuran tiap bulan berarti harus ada pemasukan terus. Nah dari Unit Pengelolaan Keuangan kemarin ada tawaran program pinjaman namanya pinjaman bergulir salah satu syaratnya kalo mau pinjam harus bentuk kelompok karena kadang kita butuhnya cepat tapi harus mencari kawan untuk buat kelompok dulu jadi

sedikit payah disini. Kita butuh dana cepat secara individu kan pikir bisa di Unit Pengelolaan Keuangan ternyata tidak, akhirnya menunggu dulu kawan yang lain. Akhirnya coba mengajukan walaupun menunggu lama dulu mau acc. Saya membutuhkan dana itu untuk tambah modal waktu sudah dapat bisa tambah isi warung yang sudah lama banyak kadaluwarsa, terus barang juga banyak habis. Ada duit tambahan pinjaman tadi isi warung bisa jualan bensin juga di rumah. Sesudah pinjam dan sebelum rasanya terbantu sekali isi warung ini kalo ada barang baru yang ada semua di pasar orang banyak lari belanja ke sini. Awal pinjam emang sedikit sampai sekarang 3.000.000 pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan, ada sedikit bertambah jualan bakso biasa dengan bakso bakar. Guyur secara bertahap tergantung kita mengolah duit itu belum mau bayar angsuran setiap bulan.⁷⁵

Selanjutnya penulis juga wawancara kepada Ibu Reka seorang

Pedagang Sayur pasar subuh, berikut hasil wawancara:

Unit Pengelolaan Keuangan tempat pinjam duit. Fungsinya untuk menambah modal buat usaha. Kepikiran mau pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan karena kepepet butuh duit terus tetangga ada cerita kalo di dusun sendiri bisa pinjam tidak pakai jaminan. Dari situ coba untuk mengajukan akhirnya dapat seterusnya sampai sekarang kan awalnya sedikit dulu dikasih pinjaman itu kalo lancar bisa naik, terserah mau pinjam berapa maksimum nya Rp 5.000.000,-. Kadang suka telat bayar tidak kena sanksi, pengurus Unit Pengelolaan Keuangan kadang mengerti kalo kita belum ada duit mau bayar bisa bayar setengah dulu. Kalo pinjam di tempat lain kalo menunggak didatangi dipaksa bayar dan ada jaminan juga kalo di Unit Pengelolaan Keuangan kan tidak, kesadaran dari masyarakatnya. Kalo kita tidak bayar kita yang malu dan juga sudah seperti orang sendiri kan sudah kenal sekali. Kendala waktu mau pinjam tidak sulit karena dikasih tau dibimbing tidak dipersulit karena sama-sama mengerjakan mengurus dengan kelompok jadi tidak terasa. Keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan menurut ayuk pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan bisa tambah modal jualan lagi, banyak macam sayuran, biasanya sebelum pinjam dikit barang terus jualan Pasar tu kan banyak saingan juga, tergantung juga kalo melihat sayuran kita banyak yang segar mau orang belanja. Alhamdulillah semenjak pinjam duit disini bertambah modal, di rumah kadang sore jualan gorengan untuk tambahan, jadi ada pemasukan duit setiap hari.

⁷⁵ Subaida (Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB

Jadi duit hasil pinjam itu berputar modalnya. Tapi kadang jualan tidak selalu lancar, pasti ada saatnya rugi.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pedagang tersebut dengan adanya Lembaga ini mereka menjadi terbantu. Hasil pendapatan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aspek produksi menjadi bertambah seperti dari Pedagang sayur pasar subuh ia tidak hanya berjualan pasar namun di rumah juga tetap berdagang, dan bisa menambah jualan lagi yaitu berdagang gorengan. Pedagang warung manisan juga kebanyakan dari mereka sudah ada tambahan usaha masing-masing selain warung manisan yaitu pemasukan berdagang lain seperti berjualan bakso.

Unit Pengelolaan Keuangan adalah salah satu lembaga kegiatan pinjaman bergulir yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran semua pranata lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Solihin selaku ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang:

Unit Pengelolaan Keuangan sudah semaksimal mungkin menjalankan fungsi, dan tugasnya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jika ditanya Unit Pengelolaan Keuangan sudah merata atau belum untuk warga miskin, menurut kami dana pinjaman yang kami salurkan sudah tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua yang mengajukan pinjaman hampir dapat semua tidak ada yang tidak dapat. Namun ada salah satu hal yang berpengaruh yaitu dari masyarakatnya yang kurang kesadaran lebih terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Terkadang ada sebagian yang tidak amanah dengan apa yang sudah diberikan.⁷⁷

⁷⁶ Reka (Nasabah UPK BKM Jaya Makmur), Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 15.00 WIB

⁷⁷ Solihin (Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), *Loc.Cit.*,

Sedangkan menurut Ibu Melinda selaku wakil/sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan menegaskan bahwa:

Kabupaten Rejang Lebong ini sebenarnya masih banyak sekali masyarakat miskin atau kurang mampu, terutama di Desa Suka datang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja masih ada yang belum tercukupi oleh karena itu kami sebagai Lembaga Unit Pengelolaan Keuangan dalam kegiatan pinjaman bergulir sebisa mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat, terutama untuk produktif masyarakat, karena disini kami hanya mencoba untuk membantu dalam kegiatan usaha, agar nantinya bisa berkembang dan jika berjalan semakin baik maka bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja melainkan bisa membeli apa yang diinginkannya dan masyarakat miskin akan semakin berkurang. Dari bantuan pinjaman ini diharapkan masyarakat merasa terbantu dan dapat meringankan beban masyarakat tersebut. Kalau untuk menyejahterakan masyarakat Unit Pengelolaan Keuangan telah berupaya untuk menyejahterakan dan membantu, tetapi karena ada salah satu faktor dari masyarakatnya sendiri ada yang tidak maksimal dalam membayar iuran angsurannya, walaupun begitu kami selalu berusaha semaksimal mungkin membantu dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan pinjaman.⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Solihin dan Ibu Melinda diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan sudah berperan untuk kesejahteraan masyarakat, walaupun di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang pinjaman dananya belum maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat, karena ada salah satu faktor yang menyebabkan ketidاكلancaran dalam pembayaran iuran yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri namun kesejahteraan bukan hanya sebatas kaya dan

⁷⁸ Melinda, (Sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, 10 Juli 2020, Pukul 15.00 WIB

miskin atau memiliki segala hal melainkan kesejahteraan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya bisa dikatakan sejahtera sebagaimana telah dijelaskan pada indikator kesejahteraan. Dengan pinjaman Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini banyak masyarakat yang tidak menganggur lagi karena sebagian ada yang ikut atau menjadi karyawan dari si peminjam nasabah Unit Pengelolaan Keuangan jadi bukan hanya dari nasabah Unit Pengelolaan Keuangan nya saja yang sejahtera namun ia juga bisa menyejahterakan karyawannya juga dan ada juga usaha yang semakin membaik dan berkembang.

2. Kendala - Kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur memiliki beberapa kendala yang dihadapi⁷⁹:

1. Keterbatasan anggaran dana

Keterbatasan anggaran dana ini menjadi isu klasik yang terjadi dimana-mana, karena semua hampir sama berbagai kendala yang terjadi mengenai anggaran dana di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dan juga menjadi kendala pokok seluruh lembaga keuangan dengan adanya batasan anggaran yang sudah sudah ditetapkan. Sebagaimana berdasarkan wawancara penulis dengan

⁷⁹ Solihin (Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), *Loc.Cit.*,

pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Desa Suka Datang tentang kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan dana bergulir atau pengelolaan keuangan dari pinjaman tersebut, wawancara dilakukan langsung dengan Bapak Solihin selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat desa Suka Datang:

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan dana bergulir ini yaitu keterbatasan anggaran dana ketika debit tidak mencukupi permintaan peminjam.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Hal ini sebagaimana penulis wawancara kepada Bapak solihin. Bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran pinjaman yang telah mereka pinjam. Di mana dalam hal tersebut duit pinjaman itu ingin digulirkan ke Kelompok Swadaya Masyarakat lain atau memutar modal disetiap tahunnya dalam pengelolaan hasil dana Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat berbentuk laporan keuangan. Namun yang terjadi malah masyarakatnya susah untuk diajak bekerja sama. Mereka suka melupakan hal baik yang diberikan oleh Unit Pengelolaan Keuangan.

Berikut hasil wawancara:

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar angsuran tepat waktu juga menjadi kendala, karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga mereka suka enggan untuk menyeter atau suka terlambat dalam membayar. Seharusnya kan walaupun dana bantuan pinjaman dari program PNPM yang bekerja sama langsung dengan Bank Dunia seharusnya mereka mengerti supaya program ini berjalan

dengan efektif. Begitulah kenapa banyak Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di Desa Suka Datang sudah tidak banyak lagi karena banyak yang macet. Jika dana tersebut banyak yang tidak membayar maka hasil dana tersebut agak kesulitan untuk menggulirkan ke Kelompok Swadaya Masyarakat lain. Dana Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat ini tidak selalu diberikan suntikan dana dari PNPM, maka dari itulah kami sebagai pengurus mencoba sebaik mungkin mengelola dana tersebut.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa kendala - kendala yang dihadapi Unit Pengelolaan Keuangan karena keterbatasan anggaran dana dari Unit Pengelolaan Keuangan ketika debit tidak mencukupi permintaan peminjam dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap angsuran yang harus mereka bayar. Padahal itu harus sesuai tepat waktu agar dana Unit Pengelolaan Keuangan bisa digulirkan kembali atau dana bisa efektif dipergunakan.

Penulis juga sudah mewawancarai beberapa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat di atas mengenai kendala - kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan dari pinjaman Unit Pengelolaan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Alam

a. Gagal panen

Gagal artinya tidak berhasil atau tidak tercapai.

Sedangkan panen artinya pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Jadi gagal panen adalah suatu kondisi di mana petani tidak berhasil atau tidak dapat memetik hasil dari sawah

⁸⁰ Melinda, (Sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), *Loc.Cit.*,

atau ladangnya. Gagal panen yang terjadi di Desa Suka Datang sering mengalami perubahan, kadang karena cuaca kemarau yang susah air serta ada hama yang merusak tanaman sehingga berkurang hasil panen yang didapat.

b. Fluktuasi harga

Secara umum fluktuasi harga adalah satu lonjakan atau ketidaktepatan yang menimpa harga-harga produk tertentu. Sedangkan perkembangan dari fluktuasi bisa digambarkan melalui grafik atau diagram. Terjadinya fluktuasi harga dari produk tertentu biasanya ditimbulkan dari kenyataan yang langsung muncul di masyarakat. Yang mana fluktuasi ini terjadi akibat adanya patokan nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jika disimpulkan maka pengertian fluktuasi harga adalah suatu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang bisa digambarkan secara grafika.

Fluktuasi harga produk di bidang pertanian bermacam-macam. Salah satunya adalah disebabkan oleh naiknya harga produk seperti pupuk, bibit, benih, dan selainnya. Selain itu hal yang mempengaruhi yang selanjutnya adalah harga produk komunitasnya sendiri memang sudah mengalami kenaikan. Seperti harga ayam dengan pakannya dan selainnya.

c. Pandemi *Corona*

Penyakit virus *corona* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus *corona*. Akibat yang ditimbulkan dari Pandemi ini terjadi gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya sehingga terjadilah pula target penjualan tidak sesuai dengan harapan dan membawa dampak bagi para Kelompok Swadaya Masyarakat Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Suka Datang terhambat serta berkurangnya penghasilan aspek produksi.

B. Pembahasan

Dari pengamatan peneliti mengenai keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur di Desa Suka Datang, penulis dapat memahami dua hal yaitu pertama, eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang. Kedua, kendala – kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang yaitu terbagi menjadi dua sisi yang pertama dari sisi masyarakatnya dan yang kedua dari lembaga Unit Pengelolaan Keuangan.

1. Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya tiap eksistensi memiliki ciri yang khas. Kierkegaard telah mengklasifikasikan menjadi tiga tahap, yakni:⁸¹

- a. Tahap Estetis (*The Aesthetic Stage*), dari ciri khas ini termasuk secara umum masyarakat peminjam yang ada di Desa Suka Datang hanya melihat keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan dari luar saja tanpa mengetahui secara lebih mendalam bagaimana keadaan dalam lembaga tersebut. Hanya sekedar kepuasan untuk meminjam namun tidak mau tau cara mengembalikan.
- b. Tahap Etis (*The Ethical Stage*), hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan teori ini. Di mana dalam ciri khas ini lebih tinggi dari tahap estetis jadi dalamnya menjelaskan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan ini lebih cenderung berkaitan dengan keadaan masyarakat dan norma yang berlaku. Selain dari kepuasan, mereka juga menerima ketika sudah mengetahui bagaimana keistimewaan dari program ini. Unit Pengelolaan Keuangan telah diterima oleh masyarakat banyak dan aturan-aturan yang diberlakukan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat sangat tinggi dalam memberikan toleransi itulah sebab mengapa banyak masyarakat melakukan pinjaman di Unit

⁸¹ F. Budi Hardiman, *Op.Cit.*, h. 251

Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur hingga bertahan sampai saat ini.

- c. Tahap *Religious*, dari ciri khas tahap di atas menjelaskan bahwa tahap ini adalah lebih kepada Tuhan. Jadi tahapan yang paling tinggi. Masyarakat desa Suka Datang yang melakukan peminjaman harus mengerti bagaimana lembaga keuangan yang menyediakan bunga pinjaman. Di mana dalam bunga adanya tambahan/riba yang tidak diperbolehkan. Sehingga bisa dikatakan keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di Desa Suka Datang belum sepenuhnya berada dalam tahap *religious*.

Dapat ditarik kesimpulan eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di Desa Suka Datang ciri khasnya termasuk dalam eksistensi tahap kedua yaitu tahap etis. Pada tahap ini cenderung sesuai dengan keadaan masyarakat dan norma yang berlaku. Kebanyakan dari mereka memilih meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan ini melihat pelayanan yang diberikan dari pihak Unit Pengelolaan Keuangan. Pelayanan yang dimaksud ialah adanya toleransi apabila peminjam telat melakukan pengembalian pinjaman. Selain itu juga proses dalam melakukan pinjaman dirasa tidak terlalu sulit, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan dari pada lembaga keuangan lainnya. Dari berbagai macam penjelasan wawancara diatas juga dapat diketahui bahwa Unit Pengelolaan

Keuangan ini juga sangat peduli dengan masyarakatnya, itulah sebabnya mereka memberikan toleransi yang tinggi karena memikirkan betul bagaimana keadaan masyarakat di Desa sendiri serta norma-norma yang berlaku yaitu seperti ketentuan dasar dan mekanisme dalam meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat. Sehingga keberadaannya sudah layak diterima oleh masyarakat banyak dan sudah sesuai dengan undang-undang atau adat yang diberlakukan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur di Desa Suka datang.

Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur sudah sangat membantu dan sudah cukup berperan dalam keberadaannya ditengah-tengah masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat yang sebagai anggota nasabah di Unit Pengelolaan Keuangan. Dengan bantuan pinjaman tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Namun ada golongan Kelompok Swadaya Masyarakat yang tidak sejahtera yaitu berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat Anggrek yaitu golongan Tukang Ojek dan Petani Tomat dari kelompok Kelompok Swadaya Masyarakat Samudra. Sebagian informan yang berargumen sama penulis hanya memasukkan wawancara dari satu perwakilan golongan/kelompok peminjam tersebut. Mereka mengatakan tidak ada perubahan ketika sesudah meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan

malah beban mereka bertambah karena harus membayar angsuran pinjaman tersebut. Sedangkan yang lainnya sudah sejahtera karena dapat membawa perubahan yang cukup positif dan perkembangan yang baik.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang setelah diukur dengan melihat indikator kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari golongan peminjam dana Unit Pengelolaan Keuangan setelah melakukan observasi dan wawancara dapat disimpulkan berikut hasilnya:⁸²

- a. Pedagang Mikro (Warung) termasuk dalam indikator KS I, KS II dan KS III yaitu Tahapan keluarga Sejahtera III. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- b. Tukang Ojek termasuk dalam indikator Tahapan Keluarga Pra-Sejahtera (KPS). Di mana tidak ada peningkatan ketika sebelum dan sesudah meminjam di Unit Pengelolaan Keuangan. Mereka lebih banyak menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sehingga uang yang harus disetor ke Unit Pengelolaan Keuangan tidak ada/telat bayar sampai berbulan-bulan. Kadang sampai habis jatuh tempo pun mereka belum bisa melunasi. Keluarga Pra-Sejahtera

⁸² Rosni, R., *Op.Cit.*, h. 59

adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

- c. Percetakan Batu Bata termasuk dalam indikator KS I, II, III dan III plus yaitu Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.
- d. Petani (Hortikultura+Palawija)
 - 1) Petani Cabe termasuk dalam indikator KS I, II, III dan III plus yaitu Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.
 - 2) Petani Tomat termasuk dalam Indikator Keluarga Pra Sejahtera. Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Petani Tomat sama sekali tidak ada perubahan ketika sudah meminjam dana Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat, masih tetap sama keadaannya sebelum meminjam di

Unit Pengelolaan Keuangan, tidak ada peningkatan dalam usahanya maupun kebutuhannya.

- 3) Petani Padi termasuk dalam indikator KS I, KS II, KS III, dan KS III Plus yaitu indikator kesejahteraan Tahapan KS III Plus, keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.

e. Peternakan

Peternak itik dan peternak ayam termasuk dalam indikator KS I, KS II, KS III, dan KS III Plus yaitu indikator kesejahteraan Tahapan KS III Plus, keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.

2. Kendala - kendala unit pengelolaan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang yaitu terbagi menjadi dua sisi yang pertama dari sisi Lembaga Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat dan yang kedua dari sisi masyarakat.⁸³

Jika dilihat dari sisi Lembaga Unit Pengelolaan Keuangannya kendala yang ditimbulkan adalah keterbatasan anggaran dana yang terjadi, itulah sebab mengapa anggaran dana pinjaman hanya dibatasi dari Rp 500.000,- sampai maksimal Rp 5.000.000,- itupun diberikan jika

⁸³ Solihin (Ketua Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 16.20 WIB

masyarakat tersebut membayarnya lancar jika ingin mencapai pinjaman sampai Rp 5.000.000 dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran secara tepat waktu. Jika masyarakat peminjam Unit Pengelolaan Keuangan tidak lancar membayar iuran maka yang terjadi adalah ketidaklancaran dana yang harus digulirkan kembali kepada masyarakat/golongan kelompok peminjam lainnya.

Kemudian dari sisi masyarakatnya terhadap peningkatan kesejahteraannya terkendala pada faktor alam yaitu gagal panen, fluktuasi harga dan pandemi *corona*. Jika dalam hidup itu apapun yang kita kerjakan tidak ada kendala baik dari usaha yang kita miliki ataupun hal yang kita lakukan maka semua akan baik-baik saja seperti halnya masyarakat peminjam Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang mungkin tidak akan ada kendala dalam membayar iuran tersebut sehingga dapat selalu membayar angsuran dengan lancar dan dapat terus mengambil pinjaman di Unit Pengelolaan Keuangan sampai tahap yang lebih besar lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat

Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang ciri khasnya termasuk dalam eksistensi tahap kedua yaitu tahap etis. Pada tahap ini cenderung sesuai dengan keadaan masyarakat dan norma yang berlaku.

2. Kendala - Kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat

Kendala - Kendala Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Jaya Makmur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Suka Datang terbagi menjadi dua golongan yang pertama dari Lembaga Unit Pengelolaan Keuangan yaitu keterbatasan anggaran dana dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran secara tepat waktu. Yang kedua dari masyarakatnya yaitu karena faktor alam seperti gagal panen, fluktuasi harga, dan pandemi *corona*.

B. Saran

1. Dalam penyaluran dana bergulir melalui Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri harusnya Unit Pengelolaan Keuangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat tersebut benar-benar diperdayakan dan digunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, beri sosialisasi dengan masyarakat secara terus menerus agar mereka paham tentang dana bergulir dari pinjaman Unit Pengelolaan Keuangan tersebut dan sadar akan pentingnya dana yang dipinjam yang harus dikembalikan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan terbantu dengan baik dan lancar ketika debit bisa digulirkan secara terus menerus dan keuangan Unit Pengelolaan Keuangan berjalan dengan efektif.
2. Agar keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat bisa maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, Unit Pengelolaan Keuangan tersebut harus benar-benar bisa menyeleksi dan memilih orang yang benar-benar tepat serta amanah dengan dana yang akan diberikan. Kemudian dalam ciri khas tahap eksistensinya juga perlu ditingkatkan lagi sehingga keberadaan Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat itu bisa menjadi eksistensi tahap *religious* yaitu sebagai fungsi agama bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Rahayuningsih (2013), *Efektifitas Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan Pada Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011*, Jurnal *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 10(1), h. 83
- Abidin, Zaenal, *Analisis Ekstensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Abidin, Zaenal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di Unit Pengelolaan Keuangan. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Skripsi Doctoral dissertation, UIN Walisongo, Januari 2016
- Adi, Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: 2012)
- Ahil, Sofian (2008), *Jurnal* <http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=3327> diakses pada tanggal 20-03-2020 pukul 15.00, h.31
- Amin, Muhamammad, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 17.00
- Anisa, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00
- Ansori, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 17.00
- Armainsi, Rambe, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, Skripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2011)
- Ayunarisha, Cut, *Efektifitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat Pada Unit Pengelola Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Di Pidie Jaya*” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Oktober 2019
- B. N. A. B. N, Asiyah (2015), *Sustainability Pinjaman Bergulir Unit Pengelolaan Keuangan PNPM Perkotaan Peluang Chaneling Bank Syariah*, *Malia (Terakreditasi)*, 7(1), h. 96
- Buku Pedoman PNPM Mandiri*, Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Umum, Jakarta 2012
- Departemen Dalam Negeri R.I, *Penjelasan X (Pengelohan Dana Bergulir*, Jakarta: Tim Koorninasi Pnpm, 2011

- F, Fidiana, & S, Ngumar (2018), *Realitas Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Batu*, Jurnal Akutansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, |e-ISSN: 2548-9836, 6(2), h. 153
- Graham, Helen, *The Human Face of Psychology: Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Idris, Muhammad, *Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2017
- Jumikun, Nasbah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 17.00
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Prosedur Operasional Standar(POS) Pengelolaan Keuangan Skala Lingkungan*, Direktorat Jenderal Cipta Karya 2018
- M. Istan, (2017), *Implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong Bengkulu*, EcceS (Economics, Social, and Development, h. 2
- Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, Malang: Sukses Offset, 2007
- Melinda, Sekretaris Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara tanggal 10 Juli 2020, Pukul 15.00
- Mil, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 19.00
- N. S. R. E, Masitoh (2015), *Pengaruh Perputaran Piutang Dan Efisiensi Modal Kerja Terhadap Kemampuan Laba Pada Unit Pengelolaan Keuangan Di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Purbayan, Gema*, 27(49), h. 1631
- Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996
- Naufal, Fakhriy, *Evaluasi Program Dana Bergulir Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Studi Analisis Deskriptif di Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

- P. Jayanti, (2013), *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (3), h. 3
- Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri)-Pedesaan, Jakarta, 2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga*
- Permenkeu, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir, Jakarta: Dpu, 2007
- R., Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (Jurnal Geografi, 9(1), 2017), h. 58
- Reka, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 15.00
- Retnadi, Djoko (2006), *Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya*, Elex media Computindo, Jakarta, h.230
- Rizal, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00
- S, Hessel Nogi, Tangkilisan 2003, *Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta. Binti
- Sanjaya, Ade, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 14.00
- Santoso, Djonet, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h.214-215
- Setiawan, Ahma Hendra, *“Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”*, Aset, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Vol. 11 No.2, September 2009, h. 110
- Sodiq, Amirus, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol.3, No 2, Desember 2015. h.383
- Solihin, Ketua Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020, pukul 14.00

Subaida, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 17.00

Sumber dari dokumen sekretariat BKM Desa Suka Datang

Sumber dari Profil Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Teknik*, Tersito Bandung, 1982

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2003

Susilawati, Nasabah Unit Pengelolaan Keuangan BKM Jaya Makmur, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00

Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1984

Syamubi, Sukaraman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 201, h. 164

Zuhri, Muhammad Tammima, *Analisa Kinerja Keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (Unit Pengelolaan Keuangan) dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta*, Skripsi, Doctoral dissertation UII 2016

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 642/In.34/FS/PP.00.9/07/2020
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 27 Juli 2020

Kepada Yth,
 Pimpinan Jamil Ashari
 Di-
 Desa Suka Datang Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

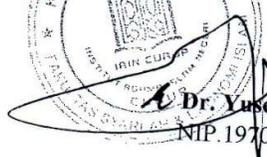
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Feristiansih
 Nomor Induk Mahasiswa : 16631156
 Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK BKM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang
 Waktu Penelitian : 27 Juli 2020 Sampai Dengan 27 September 2020
 Tempat Penelitian : Desa Suka Datang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

 Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007 4



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA SUKA DATANG
KECAMATAN CURUP UTARA

Alamat : Jl. Desa Suka Datang Kec. Curup Utara, Kode Pos (39125)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 059 / SKD-SK / VII / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAMIL ASHARI**
Jabatan : Kepala Desa Suka Datang
Alamat : Desa Suka Datang Kec. Curup Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa / Mahasiswi :

Nama : **FERISTIANSIH**
Nomor Induk Mahasiswa : 16631156
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK BKM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Datang.

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 27 Juli 2020 s/d 27 September 2020
Tempat : Desa Suka Datang

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Datang, 27 Juli 2020
Kepala Desa Suka Datang

JAMIL ASHARI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Atim Pemilik Peternakan Ayam



Wawancara dengan Bapak Rizal Pemilik Peternakan Ayam



Wawancara dengan Ibu Subaida Pedagang Warung Manisan



Wawancara dengan Ibu Reka Pedagang Sayur pasar subuh



Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin pemilik usaha Batu Bata



Wawancara dengan bapak Muhammad Arif pemilik Usaha Batu Bata



**Wawancara dengan Bapak Solihin Ketua Unit Pengelolaan Keuangan
BKM Jaya Makmur**



**Wawancara dengan Ibu Melinda Sekretaris UNIT PENGELOLAAN
KEUANGAN BKM Jaya Makmur**



Wawancara dengan bapak Jumikun pemilik Tanaman Padi

Wawancara dengan Ibu Anisa Petani tomat dan meyakinkan bahwa penulis sedang melakukan Penelitian untuk Tugas Akhir (Skripsi)



Wawancara dengan Ibu Susilawati pemilik Tanaman Cabe

Wawancara dengan Ade Sanjaya pemilik Peternak Itik



Wawancara dengan Bapak Mil Tukang Ojek dan meyakinkan bahwa penulis sedang melakukan Penelitian untuk Tugas Akhir (Skripsi)



Wawancara dengan Bapak Ansori (Tukang Ojek)

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI (Personal Identities)

Nama Lengkap : Feristiansih
Tempat / Tgl Lahir : Curup, 20 Februari 1998
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Selamat – Wastuti
Alamat : Desa Suka Datang
No. Hp : 0857 6660 2761
Email : feriscurup17@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN (Academic Record)

Sekolah / Universitas	Tahun	Jurusan/Program Studi
SD N 06 Curup Utara	2004-2010	-
SMP Negeri 1 Curup Utara	2010-2013	-
SMA Negeri 1 Curup Timur	2013-2016	IPA
IAIN Curup	2016-Sekarang	Perbankan Syari'ah